

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP
WANPRESTASI PIHAK SUBKONTRAKTOR DALAM
KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI
(Analisis Perjanjian PT. NDT *Middle East* FZE
dan PT. Internusa Perkasa Teknik)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**YUKE YUANISA SUBARCAH
NIM. 145010107111122**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP
WANPRESTASI PIHAK SUBKONTRAKTOR DALAM
KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI
(Analisis Perjanjian PT. NDT *Middle East* FZE
dan PT. Internusa Perkasa Teknik)**

YUKE YUANISA SUBARCAH

NIM: 145010107111122

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal.....
dan disahkan pada tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Mohammad Hamidi Masykur, SH., M.Kn.
NIP. 198004192008121001

Dr. Reka Dewantara, SH., MH
NIP. 198305022008121003

Mengetahui,

Ketua Bagian

Dekan Fakultas Hukum

Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, S.H, M.Si.
NIP. 19620805 198802 1001

Dr. Budi Santoso, S.H, LLM
NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

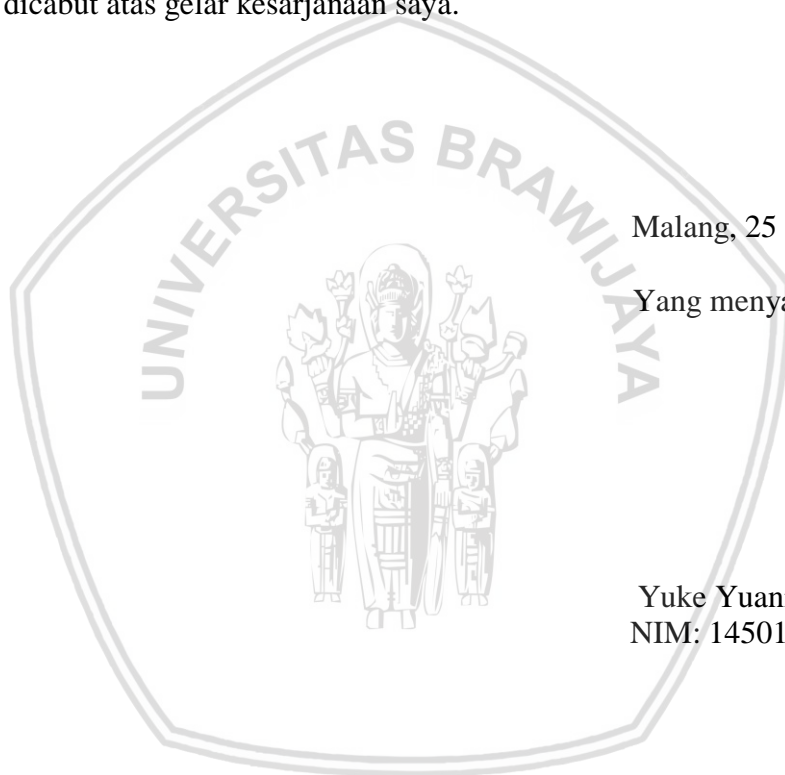
Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 25 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Yuke Yuanisa Subarkah
NIM: 145010107111122



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis ucapkan hanya kehadirat ALLAH S.W.T yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad S.A.W yang telah menunjukkan jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan bagi penulis.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
3. Mohammad Hamidi Masykur, SH, M.K.n selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini;
4. Dr. Reka Dewantara, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak dukungan terhadap penulis berupa doa, semangat, motivasi dan ilmu dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Kedua orang tua penulis. Bapak Imron Subarkah dan Ibu Nani Yuaningsih serta saudara penulis, Roni Angga Subarkah, Via Pratidina dan Hanna Rizkiva Subarkah serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, doa, dukungan materil dan dukungan lainnya yang tak terhingga kepada penulis hingga saat ini;
6. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis selama di perkuliahan, Sarah, Mia, Justin, Vidi, Fiki, Nasya, Vanya, Dimas, Dino, Oseng, Devani, Cukil, Hawin, Almira, Cia, Nton, Anka, Adam, Ganul, Abizar, Ocep, Daniel, Kent, Rezzy, Dinda Famela, Shessy, Gogon, Abeng, Hendy, Kevin, Ayu, Conde, Rovin, Dinda Faradiba, Vena, Fe, Temi, Dave, Arta, Adong, Jordi, Quinta, Yuda, Alya, Nopal dan seluruh Teman-teman dekat penulis selama perkuliahan yang selalu memberikan semangat, bantuan, motivasi kepada penulis hingga akhir masa perkuliahan;
7. Keluarga besar Fakultas Hukum 2014, Keluarga besar ALSA LC UB dan teman-teman BLC serta teman seperjuangan lainnya semasa kuliah yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran dalam bidang akademik dan non akademik sehingga memberikan banyak perkembangan positif dalam diri penulis.

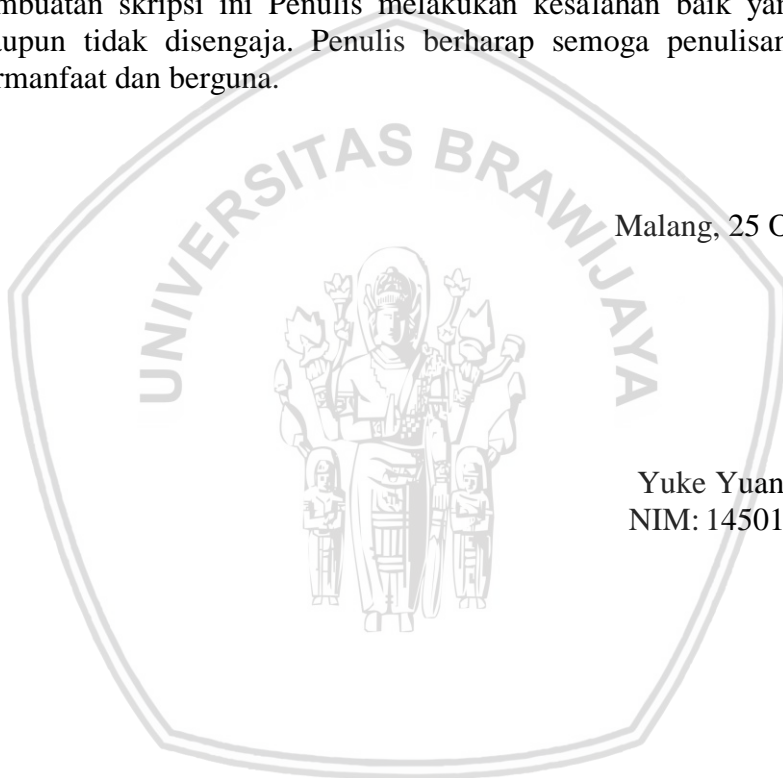
8. Ipo, Susan, Gewa, Rifki, Odang, Reno, Difa, Hanan, Surya, Omar, Sahna, Rara. Sahabat-sahabat “Mba Ani” yang memberi semangat, motivasi, kritik dan saran dari jauh.
9. Shella, Ghina, Kenny, Fina, Kadek, Merlin, Jaskia, Meisa. Sahabat-sahabat “Rumah Cece” yang selalu ada menemani dan memberi semangat bagi penulis dari SMA.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan masukan dan kritik yang mendukung untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini Penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat dan berguna.

Malang, 25 Oktober 2018

Yuke Yuanisa Subarkah
NIM: 145010107111122



RINGKASAN

Yuke Yuanisa Subarkah, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP WANPRESTASI PIHAK SUBKONTRAKTOR DALAM KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI .

(Analisis Perjanjian PT. NDT Middle East FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik) Mohammad Hamidi Masykur, SH., M.Kn., Dr. Reka Dewantara, SH., MH

Industri konstruksi di Indonesia berkembang cepat sejalan dengan aplikasi teknologi. Namun, dalam kondisinya di lapangan ukuran tentang kualitas pekerjaan terhadap spesifikasi proyek masih ada yang belum memenuhinya. Situasi ini bisa mengakibatkan pengendalian proyek menjadi kurang baik sehingga dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas tenaga kerja, kualitas terhadap pekerjaan dan terlambatnya waktu pelaksanaan. Perjanjian atau Kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak harus memenuhi empat syarat, yaitu kata sepakat kedua belah pihak, cakap untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Penyimpangan yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya prestasi sesuai yang diharapkan yang disebut dengan wanprestasi.

Dalam kasus ini, perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap wanprestasi pihak subkontraktor dalam keterlambatan proyek konstruksi apabila dikaitkan dengan bentuk perlindungan hukum menurut M. Hadjon terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif.

Maka dari itu, penelitian ini mengungkapkan bagaimana perlindungan hukum yang terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi yang mana menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Perlindungan Preventif dalam kasus ini yaitu pihak kontraktor mestinya mengantisipasi kejadian wanprestasi yang dituangkan dalam perjanjian. Sedangkan Perlindungan Represif dalam kasus ini menggunakan jalur non-litigasi dengan cara negosiasi antara PT. NDT *Middle East* FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik. Kesepakatan yang telah terjadi adalah PT. NDT *Middle East* FZE sepakat untuk membayar selisih kerugian yang ditetapkan oleh PT. Internusa Perkasa Teknik.

SUMMARY

Yuke Yuanisa Subarkah, Business, civil law, Faculty of law Brawijaya University, September 2018, LEGAL PROTECTION FOR CONTRACTORS AGAINST THE SUBCONTRACTOR'S DEFAULT IN THE CONSTRUCTION PROJECT DELAY. Mohammad Hamidi Masykur, SH., M.Kn., Dr. Reka Dewantara, SH., MH

The construction industry in Indonesia is growing rapidly in line with technology applications. However, in the real working field, the project quality specifications still has not fulfill the expected. This situation can lead to poor control of the project so that it can decrease the labor productivity, quality of work, and delay in work schedule. An agreement or contract made by both parties must fulfill four conditions, namely the agreement between the two parties, competency to make an agreement, a certain thing, and a lawful reason. The deviation in question is the failure to fulfill the expected performance, which is called a default.

In this case, legal protection for contractors against the subcontractor's default in the construction project delay if it is associated with the form of legal protection according to M. Hadjon is divided into 2 (two) parts, namely Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection.

Therefore, this study reveals how legal protection occurs if one of the parties in the agreement cause a default which leads to other party loss. Preventive protection in this case, namely the contractor should anticipate the occurrence of defaults set forth in the agreement. While Repressive Protection in this case uses a non-litigation route by way of negotiation between PT. NDT Middle East FZE and PT. Internusa Perkasa Teknik. The agreement that has been settled is PT. NDT Middle East FZE agreed to pay the difference in losses determined by PT. Internusa Perkasa Teknik.

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan.....	vi
<i>Summary</i>	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 11
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	11
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Jenis-Jenis Perikatan Menurut Undang-Undang Perikatan	15
3. Wanprestasi.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Konstruksi	19
1. Pengertian Konstruksi	21
2. Pengaturan Hukum Tentang Konstruksi	22
3. Proyek Konstruksi	23
4. Pihak-Pihak Di Dalam Proyek Konstruksi	24
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi	25
6. Awal Hubungan Kontraktor dan Subkontraktor	29
7. Risiko Konstruksi	29
8. Upaya Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi	30
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	34
1. Teori Perlindungan Hukum Preventif	35
2. Teori Perlindungan Hukum Represif	36
 BAB III METODE PENELITIAN	 37
A. Jenis Penelitian.....	37

B. Pendekatan Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	39
D. Teknik Penulisan Bahan Hukum	40
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	41
F. Definisi Konseptual	41

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP WANPRESTASI PIHAK SUBKONTRAKTOR DALAM KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI.....43

1. Latar Belakang Kontrak Kerja Antara PT. Internusa Perkasa Teknik dan PT. NDT <i>Middle East FZE</i>	43
2. Analisis Kontrak Perjanjian antara PT. Internusa Perkasa Teknik dan PT. NDT <i>Middle East FZE</i>	54
3. Perlindungan Hukum Bagi PT. Internusa Perkasa Teknik Terhadap Wanprestasi PT. NDT <i>Middle East FZE</i> atas Keterlambatan Proyek Konstruksi.....	62
4. Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. NDT <i>Middle East FZE</i> selaku Subkontraktor terhadap Keterlambatan Proyek Konstruksi.....	69
5. Pilihan Hukum Dalam Suatu Kontrak (<i>Choice Of Law</i>).....	72

BAB V PENUTUP78

1. Kesimpulan	78
2. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA80

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu	6
---------------------------------------	---

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri konstruksi di Indonesia berkembang sejalan dengan aplikasi perkembangan teknologi. Namun, dalam kondisinya di lapangan ukuran tentang kualitas pekerjaan terhadap spesifikasi proyek masih ada yang belum memenuhinya. Situasi ini bisa mengakibatkan pengendalian proyek menjadi kurang baik sehingga dapat mengakibatkan menurunnya produktivitas tenaga kerja, kualitas terhadap pekerjaan dan terlambatnya waktu pelaksanaan.¹ Pada umumnya pemilik proyek dalam membangun tidak mengerjakan sendiri proyeknya, tapi menyerahkan kepada kontraktor utama yang ahli dan berpengalaman serta bertanggung jawab mulai dari tahap awal sampai selesainya pekerjaan.²

Perkembangan dalam proses pelaksanaan konstruksi telah berubah drastis, dimana kontraktor utama yang mendapatkan kontrak (pekerjaan) selanjutnya memecah pekerjaan tersebut dan membagi (menyerahkan) kepada subkontraktor.³ Bahkan adakalanya kontraktor utama tidak lagi mengerjakan sendiri pekerjaan tapi menyerahkan semua kepada subkontraktor.⁴ Lebih dari 80 % kontraktor utama mengkonfirmasi

¹ Nur Wahyuni, "Pengaruh Manajemen Lapangan", Majalah Konstruksi, 259 (September B 1997), hlm. 28

² Clough, Richard, "*Construction Contracting*", fifth edition, John Wiley and Sons, USA, 1994, hlm.4

³ Stikes, Mc. Neil., "*Construction Law in Contractor Language : an engineering news-record book*", Mc Graw Hill. USA, 1997. Hlm.68

⁴ *Ibid*, hlm.68

kebutuhan akan kerjasama dengan 3 subkontraktor dan 2 supplier material untuk satu pekerjaan (kontrak).⁵

Perjanjian atau Kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak harus memenuhi empat syarat, yaitu kata sepakat kedua belah pihak, cakap untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Isi perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Penyimpangan yang dimaksud adalah tidak terpenuhinya prestasi sesuai yang diharapkan yang disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban sama sekali, memenuhi tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, terlambat memenuhi perjanjian, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁶

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang didalamnya terdapat pihak kontraktor mengikatkan diri kepada pemberi proyek untuk menyelesaikan pekerjaan proyek dengan harga yang telah ditentukan. Hal ini mengandung arti bahwa yang melakukan kewajiban hanyalah kontraktor saja, padahal dalam perkembangan saat ini, pihak kontraktor dan para pihak pemberi proyek saling mengikatkan diri yaitu masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Kewajiban utama para kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan, sementara kewajiban utama pemberi proyek adalah membayar uang borongan kepada kontraktor.

⁵ Ya Ting Hsieh., *Impact of Subordinating on Site Productivity : lessons learned in Taiwan*, *ASCE Journal of Construction Engineering Management*, No.2 / April, 1998, hlm. 124

⁶ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1989), hlm. 45

Keterlibatan pemberi proyek dalam penunjukan subkontraktor sedemikian jauh, sehingga dirasa adil juga jika hukum memandang telah terjadi hubungan hukum terutama antara pemberi proyek dengan subkontraktor, meskipun hubungan tersebut didalam perjanjiannya tidak disebutkan.⁷

Untuk itu banyak masalah yang di hadapi oleh pemberi proyek dan kontraktor apabila pihak subkontaktor melakukan wanpretasi. Subkontraktor yang menyimpang itu mengakibatkan kerugian dalam proyek yang harus di tanggung oleh pihak kontraktor secara langsung dan pihak pemberi proyek secara tidak langsung. Oleh karena itu pihak kontraktor lah yang harus bertanggung jawab penuh atas tindakan subkontraktor kepada pemberi proyek karena pihak subkontraktor tidak mempunyai hubungan yuridis dengan pihak pemberi proyek, maka pihak subkontraktor tidak bertanggung jawab kepada pemberi proyek kecuali bila terdapat perjanjian kontrak antara pemberi proyek dengan subkontraktor. Maka dari itu, subkontraktor harus bertanggung jawab kepada kontraktor sesuai dengan perjanjian dalam kontrak tersebut.

Dalam pandangan perseptif oleh pihak ikatan penyuplai (supplier), subkontraktor mempunyai masalah yang cukup serius terkait dengan kebutuhan subkontraktor terhadap pekerjaannya di proyek. Pekerjaan yang dihadapi subkontraktor selain khusus juga mempunyai pertimbangan persiapan, produksi dan penjadwalan pekerjaan yang berbeda dari pekerjaan

⁷ Munir Fuady, **Hukum Kontrak**, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 185.

konstruksi lainnya.⁸ Sebagai konsekuensinya, subkontraktor harus sering berkoordinasi dengan kontraktor dan penyuplai guna mendapatkan kemudahan dan menghindari dari konflik pekerjaan.⁹ Pengendalian terhadap munculnya perubahan pekerjaan, ketepatan pembayaran kepada subkontraktor, kompetensi dari subkontraktor terpilih serta pengawasan yang terus-menerus dari kontraktor utama harus menjadi perhatian tim manajemen proyek maupun perusahaan.¹⁰

Subkontraktor dalam proyek jalan bertujuan untuk membantu pekerjaan kontraktor dalam suatu pekerjaan. Sering terjadi, subkontraktor diberi peringatan oleh kontraktor karena perilakunya yang mengganggu aktivitas proyek secara keseluruhan, diantaranya keterlambatan datangnya material dan alat yang digunakan rusak (tidak berfungsi). Kondisi ini memungkinkan alokasi dana untuk pekerjaan subkontraktor menjadi meningkat. Keterlambatan tersebut sangat merugikan pihak-pihak terkait, kontraktor maupun pemilik proyek itu sendiri. Denda dapat dikenakan kepada penyedia jasa apabila tidak dapat melaksanakan proyek sesuai waktu yang tersedia dalam kontrak.¹¹

Apabila pihak kontraktor tidak membayar semua kerugian akibat dari tindakan kontraktor itu sendiri atau pun subkontraktor dan kontraktor tidak mampu mempertanggungjawabkan semua keadaan dalam proyek, maka pihak pemberi proyek akan memberi tindakan tegas yaitu melakukan pemutusan

⁸ Andrew Dainty, Geoffrey Briscoe and Sarah Millett (2001). *"Subcontractor Perspectives on Supply Chain Alliances"*. *Journal of Construction Management and Economics*, 19, hlm 841-848.

⁹ Jimmie Hinze and Andrew Tracey (1994). *"The Contractor-Subcontractor Relationship: The Subcontractor View"*. *Journal of Construction Engineering and Management*, 2, hlm 54-55.

¹⁰ Ridwan A. Muthalib. *"Analisa Resiko Komponen Biaya Subkontraktor pada Bangunan Gedung dengan Pendekatan Simulasi Monte Carlo"*. Thesis Program Magister Fakultas Teknik UI, Depok, Agustus 2003.

¹¹ Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang **Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa**

kontrak dengan kontraktor. Akibatnya bahwa kontraktor harus meninggalkan lokasi proyek, serah terima jabatan, pembayaran yang masih tersisa, ganti rugi dan juga dapat mengakibatkan black list.

Kasus yang akan dibahas di skripsi ini adalah adanya wanprestasi dari pihak subkontraktor kepada kontraktor. PT. Internusa Perkasa Teknik yang mempunyai kontrak dengan PT Pertamina Gas. PT. Pertamina gas selaku pemberi proyek, memberikan proyek caliper dan cek indikasi karena terjadi adanya Illegal Tapping. PT. Internusa Perkasa Teknik terikat dalam sebuah perjanjian dengan PT NDT Middle East FZE selaku Subkontraktor yang telah di tanda tangani secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2012. Yang dimana PT. Internusa Perkasa Teknik bertindak sebagai Kontraktor dan PT NDT Middle East FZE bertindak sebagai Subkontraktor. Atas dasar perjanjian tersebut kemudian PT Internusa Perkasa Teknik mengeluarkan *service order* pada tanggal 21 Oktober 2012 dengan subyek "*Deformation Instead Caliper*" dan meminta PT NDT melakukan inspeksi caliper 45 bagian atau kurang dari 265 km x 8 jalur pipa tempino – plaju dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 180 (seratus delapan puluh) kali. PT. NDT Middle East FZE awalnya memberikan somasi melalui Advokat nya kepada pihak PT Internusa Perkasa Teknik kerana PT Internusa Perkasa Teknik belum juga melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PT. NDT Middle East FZE dan mengancam akan memproses isomasi tersebut ke jalur hukum apabila tidak juga melakukan pembayaran. Alasan mengapa PT. Internusa Perkasa Teknik belum juga memberikan pembayaran kepada PT. NDT Middle East FZE karena peralatan PT. NDT Middle East FZE tidak berfungsi. SO atau *Service*

Order yang diberikan kepada PT. NDT Middle East FZE tidak dijalankan dengan sempurna oleh PT. NDT Middle East FZE. Pada tanggal 12 Mei 2014 PT. Internusa Perkasa teknik mengirimkan email kepada PT. NDT Middle East FZE perihal butuh penjelasan dikarenakan adanya ketidakcocokan data namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti dan tidak ada respon dari pihak PT. NDT Middle East FZE. Sehingga terjadi perbedaan antara hasil analisa alat deformation dengan fakta di lapangan. Hal itu membuat PT. Internusa Perkasa Teknik mengambil subkontraktor lain karena PT. Internusa Perkasa Teknik mendapatkan Proyek lagi dari PT. Pertamina Gas di lain area yang mengharuskan menyelesaikan proyek sebelumnya. Apabila tidak diselesaikan sesuai kontrak berakibat Blacklist terhadap PT. Internusa Perkasa Teknik dari PT. Pertamina Gas. Akhirnya timbul lah perselisihan antara PT. Internusa Perkasa teknik dengan PT. NDT Middle East Fze. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP WANPRESTASI PIHAK SUBKONTRAKTOR DALAM KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI (ANALISIS PERJANJIAN PT. NDT MIDDLE EAST FZE DAN PT. INTERNUSA PERKASA TEKNIK).**

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

N o	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Instansi	Judul Peneliti	Rumusan Masalah	Unsur Pembeda
1	2016	M. Ansyar Bora	Analisa Keterlambat An Penyelesaian Proyek Konstruksi PNG-LNG	Faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek konstruksi PNG LNG Substation 91 di PT. Megaron Semesta	Perbedaan antara penelitian yang penulis akan teliti dengan penulisan yang dibuat oleh saudara Ansyar Bora adalah penulis pada penelitian

			(Papua New Guinea – Liquid Natural Gas) Pada Substation 91 (SS 91) Oleh Subkontraktor Di PT. Megaron Semesta Batam		ini ingin menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Terhadap Wanprestasi Pihak Subkontraktor dalam Keterlambatan Proyek Konstruksi (Analisa Kasus PT. Internusa Perkasa Teknik dan PT. NDT Middle East FZE)
2	2010	Suyatno	Analisa Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek Gedung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keterlambatan penyelesaian proyek-proyek DPU dilingkungan Keresidenan Surakarta? 2. Bagaimana peringkat (rangking) factor-faktor penyebab keterlambatan pekerjaan pada proyek-proyek dilingkungan Karesidenan Surakarta? 3. Bagaimana persepsi responden terhadap factor-faktor penyebab keterlambatan proyek? 	Perbedaan antara penelitian yang penulis akan teliti dengan penulisan yang dibuat oleh saudara Suyatno adalah penulis pada penelitian ini ingin menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Terhadap Wanprestasi Pihak Subkontraktor dalam Keterlambatan Proyek Konstruksi (Analisa Kasus PT. Internusa Perkasa Teknik dan PT. NDT Middle East FZE)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kontraktor Terhadap Wanprestasi Pihak Subkontraktor Dalam Keterlambatan Proyek Konstruksi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap wanprestasi dari pihak subkontraktor dalam keterlambatan proyek konstruksi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perjanjian pekerjaan proyek konstruksi antara pihak kontraktor dan pihak subkontraktor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PT. Internusa Perkasa Teknik

- I. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan atas langkah-langkah yang telah atau sedang diambil oleh instansi terkait dalam mencapai tujuannya.

II. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada PT. Internusa Perkasa Teknik tentang menganalisis penyebab dari keterlambatan pekerjaan proyek konstruksi dan upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara PT. Internusa Perkasa Teknik dengan PT. NDT Middle East FZE.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada perumus dan pelaksana kebijakan agar dapat melaksanakan peraturan tersebut dengan lebih baik sehingga memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum dalam masyarakat mengenai penyebab dari keterlambatan pekerjaan proyek konstruksi dan upaya penyelesaian wanprestasi yang terjadi antara PT. Internusa Perkasa Teknik dengan PT. NDT Middle East FZE.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas bagi masyarakat tentang upaya penyelesaian perjanjian wanprestasi antara pihak kontraktor dengan pihak subkontraktor dalam perusahaan jasa konstruksi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman materi, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Berikut ini adalah uraian isi dari setiap bab secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri atas latar belakang penulis meneliti mengenai penyebab dari keterlambatan proyek konstruksi antara pihak Kontraktor dengan pihak Subkontraktor.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang uraian tinjauan umum tentang hukum perjanjian, kajian teoritik perjanjian pemborongan pekerjaan (Perjanjian Konstruksi) serta menjelaskan mengenai definisi yang ada berhubungan dengan masalah penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metode penelitian jasa penelitian, lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan dari rumusan masalah penelitian, dimana masalah penelitian dibahas lebih lanjut dalam pembahasan ini.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran dari pembahasan mengenai masalah penelitian yang dikaji penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut kamus hukum, perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.¹² Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Apabila perjanjian dibuat secara tertulis maka perjanjian itu bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.¹³ Istilah perjanjian adalah terjemahan dari bahasa Belanda *overeenkomst* atau *contract* (Inggris). Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁴ Pada dasarnya perjanjian merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.¹⁵ Perjanjian adalah “suatu tindakan hukum dua pihak, jika norma sekunder yang mewajibkan dan memberi wewenang kepada para pihak yang melakukan perjanjian

¹² Subekti (1), **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 89

¹³ Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung, 1994, hlm. 18

¹⁴ Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata** (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.161-162

¹⁵ Ridwan Khairandy, **Hukum Kontrak Indonesia: Dalam perspektif Perbandingan** (Bagian Pertama) (Yogyakarta, FH. UII Press, 2014), hlm.40

dilahirkan oleh kerja sama (kolaborasi) dan sekurang-kurangnya dua orang individu”.¹⁶

M. Yahya Harahap memberi pengertian perjanjian atau verbinteniss mengandung pengertian “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara lain hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu dan pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.¹⁷ Dari pengertian perjanjian tersebut, di dalamnya terdapat unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian antara lain : “hubungan hukum (rechtsbetrekking) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (persoon) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Wirjono Prodjodikoro memberi pengertian perjanjian sebagai “suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.¹⁸ Perjanjian merupakan hubungan hukum mengenai harta kekayaan, dan sebagian besar dari perjanjian ini bersumber pada kata sepakat atau persetujuan antara kedua belah pihak.

Menurut pasal 1601 b KUH perdata, perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong), mengikatkan diri untuk

¹⁶ Hans Kelsen, **Teori Hukum tentang Hukum dan Negara**, terjemahan RaisulMuttaqin, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 204.

¹⁷ M. YahyaHarahap, *Ibid Op. Cit.*, hlm. 6.

¹⁸ WirjonoProdjodikoro, **Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu**, Sumur, Bandung, 1991, hlm. 1.

menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain (pihak yang memborongkan), dengan menerima suatu harga yang ditentukan.¹⁹

Isi perjanjian pemborongan pekerjaan bahwa pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.²⁰

Perjanjian pemborongan pekerjaan dibedakan dalam dua macam, yaitu:

- (1) Di mana pihak pemborong diwajibkan memberikan bahannya untuk pekerjaan tersebut, dan
- (2) Di mana si pemborong hanya akan melakukan pekerjaannya saja.

Syarat-syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Didalam hukum perjanjian dikenal tiga asas yaitu Asas Konsensualisme, Asas *Pacta Sunt Servanda*, dan Asas Kebebasan Berkontrak.²¹

1) Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara

¹⁹ F.X. Djumaldji, **Perjanjian Pemborongan** (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 3

²⁰ Subekti, **Aneka Perjanjian** (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 65.

²¹ Titik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional** (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 227-229



pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.

Berdasarkan pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak.

2) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas Pacta Sunt Servanda berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3) *Asas Kebebasan Berkontrak*

Asas Kebebasan Berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (Perjanjian) yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Asas Kebebasan Berkontrak dituangkan dalam Pasal 1338 ayat (1) BW. Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat

kontrak perjanjian secara bebas, tetapi kontrak (perjanjian) harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat untuk sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut dalam Pasal 1320 BW maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu.²²

2. Jenis – Jenis Perikatan Menurut Undang-undang Perikatan (BW)

1. Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk*)

Menurut Pasal 1253 KUHperdata tentang perikatan bersyarat “suatu perikatan adalah bersyarat mankala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”. Berdasarkan pasal ini dapat diketahui bahwa perikatan bersyarat dapat dibedakan atas dua, yaitu::

- a. Perikatan dengan syarat tangguh;
- b. Perikatan dengan syarat berakhir (batal).

2. Perikatan Dengan ketetapan Waktu (*tidjsbepaling*)

Menurut KUHperdata pasal 1268 tentang perikatan-perikatan ketetapan waktu, berbunyi “ suatu ketetapan waktu tidak, menanggihkan perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaanya”. Pasal ini menegaskan bahwa ketetapan waktu tidak menanggihkan lahirnya perikatan, tetapi hanya menanggihkan

²² Ridwan Syahrani, **Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata** (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 204.

pelaksanaanya. Ini berarti bahwa perjanjian dengan waktu ini pada dasarnya perikatan telah lahir, hanya saja pelaksanaanya yang tertunda sampai waktu yang ditentukan.

3. Perikatan mana suka (*alternatif*)

Menurut pasal 1272 KUHperdata tentang mengenai perikatan-perikatan mana suka (*alternatif*) berbunyi, “tentang perikatan-perikatan mana suka debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa kreditor untuk menerima kreditor untuk sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya”. Dalam perikatan alternatif ini debitur telah bebas jika telah menyerahkan salah satu dari dua atau lebih barang yang dijadikan alternatif pembayaran.

4. Perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng (*hoofdelijk atau solidair*)

Perikatan tanggung menanggung meliputi,

- a. Perikatan tanggung menanggung aktif,
- b. Perikatan tanggung menanggung pasif.

5. Perikatan yang dapat dibagi dan perikatan yang tidak dapat dibagi

Sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu berdasarkan pada:

- a. Sifat benda yang menjadi objek perikatan.
- b. Maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi.

Arti dari dapat dibagi atau tidak dapat dibagi itu adalah apabila dalam perikatan itu terdapat lebih dari seorang debitor atau lebih dari seorang kreditor. Jika hanya seorang kreditor perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi.

6. Perikatan dengan penetapan hukuman (*strabeding*)

Menurut pasal 1304 tentang mengenai perikatan-perikatan dengan ancaman hukuman, berbunyi “ ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk imbalan jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi”. Ketentuan tersebut sebenarnya merupakan pendorong bagi debitor untuk memenuhi perikatannya karena apabila ia lalai dalam melaksanakannya dia dikenai suatu hukuman tertentu, yang tentu saja akan membawa kerugian baginya karena dengan hukuman tersebut kewajiban akan semakin besar.

3. Wanprestasi

Dalam pasal 1243 menyatakan bahwa wanprestasi adalah “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi prestasinya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikn atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”²³

²³ Agus Yudha Hermeko, **Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial** (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 261

Debitur dinyatakan lalai apabila:

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Terlambat berprestasi
- c. Berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya

Namun pada umumnya wanprestasi baru terjadi setelah adanya pernyataan lalai (in mora stelling: ingebereke stelling) dari pihak kreditur kepadadebitur.

Akibat adanya wanprestasi:²⁴

- a. Perikatan tetap ada
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 KUH Perdata)
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH perdata.

²⁴ Salim Hs, **Pengantar Hukum Perdata**, hlm. 180-181.

B. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Konstruksi

Perusahaan konstruksi adalah salah satu usaha dalam sektor ekonomi yang berhubungan dengan suatu perencanaan atau pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan atau bentuk fisik lain yang dalam pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan bangunan tersebut menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat pengguna bangunan tersebut.

Menurut Ervianto definisi perusahaan kontraktor adalah orang atau badan usaha yang menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan.²⁵

Dalam kenyataan sehari-hari, istilah kontrak konstruksi sering juga disebut dengan perjanjian pemborongan. Istilah pemborongan dan konstruksi mempunyai keterikatan satu sama lain. Istilah pemborongan memiliki cakupan yang lebih luas dari istilah konstruksi. Hal ini disebabkan karena istilah pemborongan dapat saja berarti bahwa yang dibangun tersebut bukan hanya konstruksinya, melainkan dapat juga berupa pengadaan barang saja, tetapi dalam teori dan praktek hukum kedua istilah tersebut dianggap sama terutama jika terkait dengan istilah hukum/kontrak konstruksi atau hukum/kontrak pemborongan. Jadi dalam hal ini istilah konstruksi dianggap sama, karena mencakup keduanya yaitu ada konstruksi (pembangunannya) dan ada pengadaan barangnya dalam pelaksanaan pembangunan.²⁶

²⁵ Ervianto, Wulfram I., 2002. **Manajemen Proyek Konstruksi**, Edisi Pertama, Salemba Empat, Yogyakarta.

²⁶ Munir Fuady. **Kontrak Pemborongan Mega Proyek** (Bandung: Citra Aditya Kartini, 1998), hlm 12.

Menurut R. Subekti perjanjian pemborongan adalah perjanjian dimana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan.²⁷ Dalam KUH Perdata, perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1601 (b) KUH Perdata bahwa: “Perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak satu (si pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain (pihak yang memborongkan) dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, dilihat dari sistem hukum maka kontrak bangunan merupakan salah satu komponen dari hukum bangunan (*construction law, bouwrecht*). Istilah *construction law* biasa dipakai dalam kepustakaan *anglo saxon*, sedangkan *bouwrecht* lazim dipergunakan dalam kepustakaan Hukum Belanda. Dengan demikian, yang dinamakan hukum bangunan adalah seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang bertalian dengan bangunan meliputi pendirian, perawatan, pembongkaran, penyerahan, baik bersifat perdata maupun publik/administratif.²⁸

Dalam kontrak konstruksi, sebagaimana kontrak pada umumnya akan menimbulkan hubungan hukum maupun akibat hukum antara para pihak yang membuat perjanjian. Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban

²⁷ R. Subekti, **Aneka Perjanjian** (Bandung : Alumni, 1985), hlm 57.

²⁸ Amari, Mohammad dan Asep N. Mulyana, 2010, **Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi**, Aneka Ilmu, Semarang.

diantara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatanganinya kontrak konstruksi oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak konstruksi adalah:²⁹

1. Adanya subjek, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa;
2. Adanya objek, yaitu konstruksi;
3. Adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

1. Pengertian Konstruksi

Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area.

Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal, Konstruksi Struktur Bangunan adalah bentuk/bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan. contoh lain: Konstruksi Jalan Raya, Konstruksi Jembatan, Konstruksi Kapal, dan lain-lain.

Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya) Walaupun kegiatan konstruksi dikenal sebagai satu

²⁹ H. S. Salim, 2004, **Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak**, Cet. II. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91

pekerjaan, tetapi dalam kenyataannya konstruksi merupakan satuan kegiatan yang terdiri dari beberapa pekerjaan lain yang berbeda.

2. Pengaturan Hukum Tentang Konstruksi

Penyelenggaraan pengadaan bidang konstruksi di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Dari segi substansinya, kecuali mengenai segi-segi hukum kontrak, undang-undang ini cukup lengkap mengatur pengadaan jasa konstruksi.³⁰

Undang-undang ini dibuat pada masa reformasi. Latar belakang lahirnya undang-undang ini karena berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi pada pengembangan jasa konstruksi yang sesuai dengan karakteristiknya. Hal ini mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal maupun bagi kepentingan masyarakat. Undang-Undang Jasa Konstruksi ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999 . ketentuan terdiri atas 12 bab dan 47 pasal.³¹

Pengaturan lebih lanjut dari undang-undang ini tertuang dalam tiga peraturan pemerintah yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta

³⁰ Simamora, Y. Sogar, 2013, **Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)**, Kantor Hukum “Wins & Partners”, Cetakan kedua, Surabaya.

³¹ H. S. Salim, 2004, **Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak**, Cet. II. Sinar Grafika, Jakarta.

Masyarakat Jasa Konstruksi (PP No. 28/2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 (PP No. 4/2010), Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (PP No. 29/2000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2010 (Perpres No. 59/2010), dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (PP No. 30/2000).³²

3. Proyek Konstruksi

Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan dimana ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu, proyek biasanya bersifat lintas fungsi organisasi sehingga membutuhkan bermacam keahlian (*skills*) dari berbagai profesi dan organisasi. Setiap proyek adalah unik, bahkan tidak ada dua proyek yang persis sama.

Dipohusodo menyatakan bahwa suatu proyek merupakan upaya yang mengerahkan sumber daya yang tersedia, yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran dan harapan penting tertentu serta harus diselesaikan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan.³³ Proyek adalah aktivitas sementara dari personil, material, serta sarana untuk menjadikan/mewujudkan sasaran - sasaran (*goals*) proyek dalam

³² Simamora, Y. Sogar, 2013, **Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)**, Kantor Hukum "Wins & Partners", Cetakan kedua, Surabaya, hlm 214

³³ Dipohusodo, Istimawan. 1996. **Manajemen Proyek Konstruksi Jilid 2**. Kanisius: Yogyakarta

kurun waktu tertentu yang kemudian berakhir. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu (bangunan/konstruksi) dalam batasan waktu, biaya dan mutu tertentu. Proyek konstruksi selalu memerlukan *resources* (sumber daya) yaitu *man* (manusia), *material* (bahan bangunan), *machine* (peralatan), *method* (metode pelaksanaan), *money* (uang), *information* (informasi), dan *time* (waktu).

4. Pihak-pihak Di Dalam Proyek Konstruksi

- i. Owner/Pemilik, adalah orang atau badan yang memerintahkan atau memberikan pekerjaan (proyek) kepada pihak lain (Konsultan/kontraktor) untuk dilaksanakan dan membayar serta menerima hasil pekerjaan tersebut.
- ii. Pemimpin Proyek/Pemimpin bagian proyek, adalah orang yang ditunjuk oleh pemilik untuk memimpin dan bertindak sebagai pemilik di dalam pengelolaan proyek.
- iii. Konsultan Perencana adalah badan usaha atau orang yang ditunjuk oleh owner untuk membuat perencanaan lengkap tentang proyek yang diinginkan, sehingga siap dilelangkan dan dilaksanakan.
- iv. Konsultan Pengawas (*Supervisi*) adalah badan usaha atau orang yang diberi tugas atau ditunjuk oleh owner untuk

melaksanakan pengawasan atau pengendalian pelaksanaan proyek agar sesuai dengan perencanaannya.

- v. Kontraktor adalah perusahaan yang melakukan kontrak kerja dengan orang atau perusahaan lain untuk memasok barang atau menyelesaikan jasa tertentu. Bidang kerjanya mungkin pembangunan gedung, pembuatan jalan raya, pembangunan instalasi listrik, dan penyediaan ribuan generator. Dalam prakteknya, sebuah perusahaan kontraktor tidak menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut secara sendirian. Bahkan, bila nilai proyeknya besar, maka kontraktor tersebut mencari puluhan atau ratusan kontraktor lain untuk menyelesaikan proyek. Ringkasnya, perusahaan tersebut mensubkontrakkan pekerjaan ke perusahaan-perusahaan lain.
- vi. Subkontraktor merupakan sebuah pihak yang ikut dalam pelaksana proyek di bawah kendali Main Kontraktor. Subkontraktor bekerja dan mengikat kontrak dengan Main Kontraktor.

5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Konstruksi

Dalam setiap perjanjian atau kontrak yang melibatkan dua pihak pastilah menimbulkan hak dan kewajiban atau tugas dan kewenangan bagi para pihak. Hak bagi satu pihak merupakan kewajiban (prestasi) yang harus dilaksanakan oleh pihak

lainnya. Demikian pula dalam kontrak kerja konstruksi terdapat dua pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi, yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah diuraikan diatas dan merupakan prestasi yang harus dilakukan.

Hak pengguna jasa konstruksi adalah memperoleh hasil pekerjaan konstruksi, sesuai dengan klasifikasi dan kualitas yang diperjanjikan. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jasa Konstruksi, kewajiban pengguna jasa dalam suatu kontrak mencakup:

1. Menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;
2. Menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan;
3. Memenuhi ketentuan yang diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi.

Adapun kewajiban dari penyedia jasa konstruksi adalah mencakup :

- a) Menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa;
- b) Melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Hak penyedia jasa konstruksi adalah memperoleh informasi dan menerima imbalan jasa dari pekerjaan konstruksi yang telah dilakukannya. Informasi yang dimaksud merupakan dokumen secara lengkap dan benar yang harus disediakan oleh pengguna jasa untuk penyedia jasa konstruksi sehingga dapat melakukan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Pada tahap pelaksanaan fisik di lapangan, seringkali Main Kontraktor dipusingkan dengan adanya banyak paket pekerjaan. Oleh sebab itu, biasanya Main Kontraktor merekrut Subkontraktor untuk mengerjakan paket-paket pekerjaan tersebut. Selain alasan tersebut, ada alasan lain yang membuat sebuah proyek menggunakan jasa subkontraktor antara lain :

1. Jenis pekerjaan yang bersifat khusus dan spesialis. Sebagai contoh pekerjaan baja akan lebih efisien diserahkan kepada perusahaan yang memang spesialis dibidang baja sebagai subkontraktor daripada dikerjakan sendiri oleh Main Kontraktor.
2. Tersedianya Perusahaan Subkontraktor yang mampu dan bonafide. Perusahaan yang mampu secara teknis dan finansial adalah faktor utama dalam mempertimbangkan penyerahan bagian lingkup proyek kepada subkontraktor, disamping harga yang wajar.

3. Kebijakan Pemerintah. Untuk jenis pekerjaan tertentu, Pemerintah menginginkan dikerjakan oleh perusahaan setempat yang dianggap mampu. Hal ini mendorong adanya subkontraktor.

Subkontraktor dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

1. Subkontraktor yang menyediakan pekerja saja, yaitu subkontraktor yang dalam melaksanakan pekerjaan bangunan/konstruksi hanya menyediakan tenaga kerja dan alat kerja konstruksi (traktor, mesin pancang, dan sebagainya) sedangkan bahan bangunan disediakan oleh perusahaan yang mensubkontrakkan.
2. Subkontraktor yang menyediakan pekerja dan material konstruksi, yaitu subkontraktor yang menerima dan melaksanakan sebagian/seluruh pekerjaan/proyek konstruksi yang disubkontrakkan secara penuh oleh perusahaan kontraktor, artinya penyediaan bahan bangunan dan tenaga kerja seluruhnya adalah tanggung jawab subkontraktor.

Pada dasarnya dalam mengelola pekerjaan subkontraktor sama dengan pekerjaan main kontraktor. Hanya ada beberapa hal yang menuntut perhatian yang lebih besar, karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Volume pekerjaan tidak begitu besar.
2. Spesialisasi pada jenis pekerjaan tertentu.
3. Tidak melengkapi diri dengan prosedur atau sistem pengendalian yang lengkap.
4. Perkiraan biaya untuk pembanding.

6. Awal Hubungan Kontraktor dan Subkontraktor

Jika pemilik tidak membangun sendiri, pemilik akan memakai kontraktor utama yang berpengalaman dan bertanggung jawab untuk semua tahap konstruksi. Dalam sistem kontrak tunggal, pemilik memakai satu kontraktor utama, yang memiliki hubungan kontrak dengan pemilik dan bertanggung jawab penuh untuk kinerja subkontraktor dan pihak ketiga lain dalam kontrak konstruksi. Dalam sistem kontrak utama ganda, pemilik tidak hanya memakai satu kontraktor utama yang melakukan pengawasan terpusat untuk seluruh proses konstruksi. Proyek dibangun oleh beberapa kontraktor utama yang berbeda, dimana masing-masing kontraktor melakukan kontrak dengan pemilik dan bertanggung jawab langsung untuk bagian khusus total proyek.

7. Risiko Konstruksi (*Constaruction related risk*)

Kegiatan pada suatu proyek konstruksi membutuhkan sumber daya yang besar, tingkat penguasaan teknologi dan

produk yang spesifik. Karakteristik khusus dari proyek konstruksi ini mengandung potensi risiko yang tidak kecil. Pada tahap pelaksanaan, berbagai risiko dapat muncul, hal ini timbul karena factor ketidakpastian dalam tahapan ini bias sangat besar, bila kontraktor tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam bidang pelaksanaan.

8. Upaya Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Juncto Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta peraturan lain, mengisyaratkan bahwa penyelesaian sengketa jasa konstruksi dilakukan melalui jalur di luar pengadilan.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa jasa konstruksi yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat, diarahkan pada penyelesaian di luar pengadilan dan bermuara pada penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitrase. Dalam hal kasus sengketa yang bersifat kontraktual atau sengketa dimasa pelaksanaan pekerjaan sedang berlangsung, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui jalur-jalur sebagai berikut:³⁴

³⁴ H. Shahab, **Menyingkap dan Meneropong Undang-undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 dan Penyelesaian Alternatif serta kaitannya dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 dan FIDIC** (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 65.

1) Jalur Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara satu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yaitu konsultan. Pihak konsultan ini memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut. Dalam jasa konstruksi, konsultan berperan penting dalam penyelesaian masalah-masalah teknis lapangan, apalagi apabila konsultan tersebut merupakan konsultan perencana dan atau konsultan pengawas proyek. Pendapat mereka sangat dominan untuk menentukan kelancaran proyek.

2) Jalur negosiasi

Pada dasarnya negosiasi adalah upaya untuk mencari perdamaian di antara para pihak yang bersengketa sesuai pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya dalam pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 Bab Kedelapanbelas Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perdamaian, terlihat bahwa kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak yang bersengketa, harus dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak. Perbedaan yang ada dari kedua aturan tersebut adalah bahwa kesepakatan tertulis tersebut ada yang cukup ditandatangani para pihak dengan tambahan saksi yang disepakati kedua belah pihak. Sedangkan yang satu

lagi, kesepakatan telah diambil harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan sebelum proses sidang pengadilan atau sesudah proses sidang berlangsung, baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan (Pasal 130 HIR). Dari literatur hukum dapat diketahui, selain sebagai lembaga penyelesaian sengketa, juga bersifat informal meskipun adakalanya juga bersifat formal.

3) Jalur Mediasi

Dari beberapa pengertian yang ada, maka pengertian mediasi adalah pihak ketiga (baik perorangan atau lembaga independen), tidak memihak dan bersifat netral, yang bertugas memediasi kepentingan dan diangkat serta disetujui para pihak yang bersengketa. Sebagai pihak luar, mediator tidak memiliki kewenangan memaksa, tetapi bertemu dan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan pokok perkara.

Berdasarkan masukan tersebut, mediator dapat menentukan kekurangan atau kelebihan suatu perkara, kemudian disusun dalam proposal yang kemudian dibicarakan kepada para pihak secara langsung. Peran mediasi ini cukup penting karena harus dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga para pihak yang bersengketa dapat berkompromi dan menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan di

antara para pihak yang bersengketa. Mediasi juga merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa.

4) Jalur Konsoliasi

Konsiliasi menurut sumber lain, dapat disebut sebagai perdamaian atau langkah awal perdamaian sebelum sidang pengadilan (*ligitasi*) dilaksanakan, dan ketentuan perdamaian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, juga merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mengecualikan untuk hal-hal atau sengketa yang telah memperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

5) Jalur Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase

Arbitrase adalah bentuk kelembagaan, tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan perbedaan atau perselisihan atau sengketa yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian pokok, akan tetapi juga dapat memberikan konsultasi dalam bentuk opini atau pendapat hukum atas permintaan para pihak dalam perjanjian. Pendapat hukum lembaga *arbitrase* bersifat mengikat, dan setiap pelanggaran terhadap pendapat hukum yang diberikan tersebut berarti pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of contract – wanprestasi*). Sifat dari pendapat hukum lembaga *arbitrase* ini termasuk dalam pengertian atau bentuk “putusan” lembaga *arbitrase*.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Hukum yang baik adalah hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.³⁵ Dan selanjutnya perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjo adalah sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.³⁶

Dalam rumusan prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule Of The Law*. Dengan menggunakan konsep barat sebagai kerangka berfikir dengan berdasarkan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁷

³⁵ Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum**, (Bandung; PT. Otr Aditya Bakti, 1996), hlm. 53

³⁶ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

³⁷ *Ibid*, hlm. 38.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk khususnya bagi rakyat Indonesia, Phillipus M, Hadjon membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif
2. Perlindungan Hukum Represif

1) Teori Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Pada perlindungan hukum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang devintif. Sehingga perlindungan hukum ini tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas Fries Ermessen.³⁸

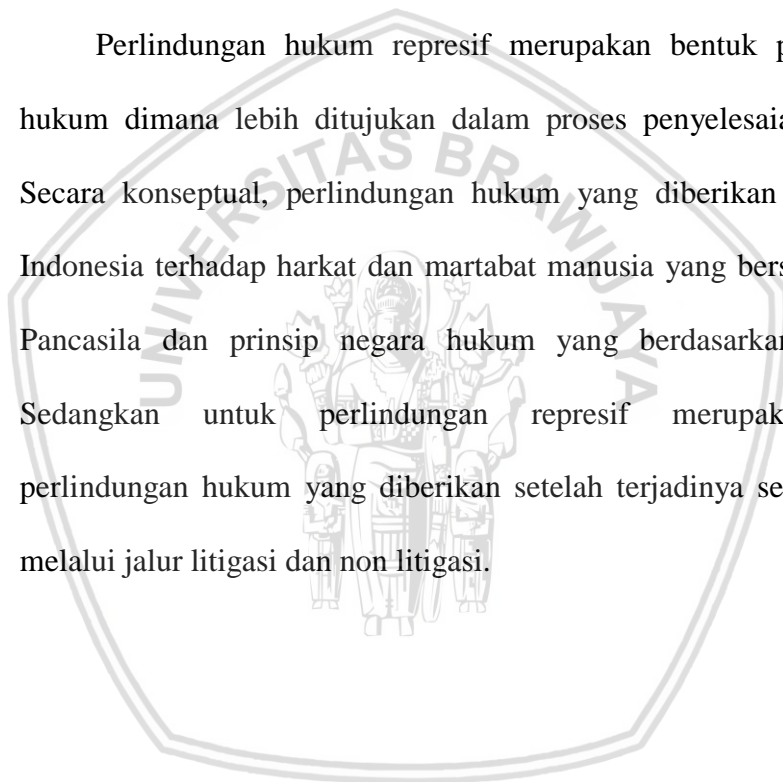
Perlindungan hukum preventif ini penulis gunakan untuk menganalisa mengenai adanya penambahan klausula perjanjian antara PT. NDT *Middle East* FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik. Seseuai dengan tema yang penulis ambil adalah mengenai perlindungan hukum

³⁸ Freies Ermessen sendiri berasal dari `berasal dari Bahasa Jerman, secara etimologi berasal dari dua kata freies dan ermessen. Sedangkan secara etimologis, Freies Ermessen artinya orang yang bebas mempertimbangkan, bebas menilai, bebas menduga dan bebas mengambil keputusan. Oleh Marbun dan Ridwan HR mengemukakan bahwa freies ermessen merupakan kebebasan yang melekat bagi pemerintah atau administrasi negara. Dalam Damang, SH, Freies Ermessen (Online). <http://AHmv.negarahukum.com/hukum/ihBies-ermessen.html>

bagi kontraktor terhadap wanprestasi pihak subkontraktor dalam keterlambatan proyek konstruksi. Oleh sebab itu, untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi salah satu pihak, maka perlu adanya klausula di dalam perjanjian untuk memperjelas adanya suatu wanprestasi.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam proses penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sedangkan untuk perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah penelitian Yuridis Normatif (*Normative Research*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan cara menelaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan atau dokumen terkait yang relevan untuk menjawab isu hukum dan melakukan kajian kepustakaan atau bahan sekunder dalam perlindungan hukum bagi pihak kontraktor terhadap wanprestasi pihak subkontraktor dalam keterlambatan proyek konstruksi. Penelitian hukum Yuridis Normatif, sering kali hukum yang dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁹ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap wanprestasi pihak subkontraktor dalam keterlambatan proyek konstruksi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian normatif adalah selalu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai

³⁹ Amiruddin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118

aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.⁴⁰ Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ialah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Menelaah dan mempelajari mengenai kesesuaian perundang-undangan atau aturan yang bersangkutan dengan penelitian. Yaitu, antara Kontrak Kerja PT. NDT *Middle East* FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Sedangkan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan dimana peneliti tidak menemukan aturan hukum yang ada sehingga kemudian peneliti menggunakan konsep hukum sebagai pendekatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum hingga putusan pengadilan. Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual digunakan untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap wanprestasi pihak subkontraktor dalam keterlambatan proyek konstruksi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

⁴⁰ Johni Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum**, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 300.

Melakukan analasia terhadap sebuah kasus, kemudian menelaah kasus-kasus dan putusan-putusan yang memiliki pokok permasalahan serupa dengan kasus ini. Sehingga dapat menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan analisa terhadap kasus ini.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan sekunder. Dimana bahan hukum atau bahan dalam penelitian, bahan yang diperoleh langsung dengan yang diperoleh pada umumnya dibedakan antara bahan yang diperoleh langsung dengan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan yang diperoleh dari masyarakat dinamakan bahan primer, sedangkan bahan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dinamakan bahan sebagai bahan sekunder.

Bahan sekunder itu terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kontrak Kerja antara PT. NDT Middle East FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik

2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah Sumber data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan untuk melengkapi data primer. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi, mendukung, dan memperkaya sumber data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang terdapat di Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum Kota Malang, hasil penelitian kepustakaan, dan sumber dari internet.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini untuk penelusuran bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan segala aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Dalam proses pengumpulan bahan, peneliti menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis yang berhubungan dengan materi penelitian.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam proses analisa terhadap bahan hukum yang telah terkumpul, penulis akan mengkaji dan mengolah bahan hukum tersebut menggunakan metode interpretasi hukum yaitu:

- a. Interpretasi Gramatikal, proses penafsiran di lakukan dengan cara menafsirkan makna dan arti dari kata-kata yang terdapat di dalam bahan hukum yang ada sesuai dengan kaidah tata hukum Bahasa.
- b. Interpretasi Sistematis, proses penafsiran di lakukan dengan menganalisa hubungan antara suatu pasal dengan pasal lainnya dalam peraturan yang terkait.

F. Definisi Konseptual

1. Kontrak

Dalam bahasa Belanda, adalah “*contract*”, atau “*verbinten*” yang berarti perjanjian. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Perjanjian adalah “suatu tindakan hukum dua pihak, jika norma sekunder yang mewajibkan dan memberi wewenang kepada para pihak yang melakukan perjanjian dilahirkan oleh kerja sama (kolaborasi) dan sekurang-kurangnya dua orang individu

2. Proyek Konstruksi

Proyek Konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu (bangunan/konstruksi) dalam batasan waktu, biaya dan mutu tertentu.

3. Kontraktor

Kontraktor merupakan perusahaan yang melakukan kontrak kerja dengan orang atau perusahaan lain untuk memasok barang atau menyelesaikan jasa tertentu. Bidang kerjanya mungkin pembangunan gedung, pembuatan jalan raya, pembangunan instalasi listrik, dan penyediaan ribuan generator

4. Subkontraktor

Subkontraktor merupakan sebuah pihak yang ikut dalam pelaksana proyek di bawah kendali Main Kontraktor. Subkontraktor bekerja mengikat kontrak dengan Main Kontraktor.

5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah penggantian biaya rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi prestasinya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONTRAKTOR TERHADAP WANPRESTASI PIHAK SUBKONTRAKTOR DALAM KETERLAMBATAN PROYEK KONSTRUKSI

1. Latar Belakang Kontrak Kerja Antar PT. Internusa Perkasa Teknik dan PT. NDT *Middle East* FZE

Perjanjian atau Verbintenis mengandung pengertian : suatu hubungan Hukum Kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴¹

Pada mulanya, PT. NDT *Middle East* FZE selaku subkontraktor menawarkan pekerjaan kepada PT. Internusa Perkasa Teknik selaku Kontraktor atas pekerjaan proyek konstruksi pipa gas. PT. NDT *Middle East* FZE yang sedang bekerja sama dengan PT. Internusa Perkasa Teknik dalam proyek konstruksi sebagaimana tertuang dalam perjanjian No. Q.AP.12.023 v00/ PTGS pada tanggal 30 Oktober 2012. PT. NDT *Middle East* FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik sepakat untuk bekerja sama selaku kontraktor dan subkontraktor dengan harapan terciptanya suatu pekerjaan yang terlaksana dengan baik sebagai landasan utama perancangan kontrak ini. Adanya perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak sebagai berikut:

⁴¹ M.Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Penerbit Alumni, Bandung, 1986. hlm 6.

Sistem & Layanan PT. NDT *Middle East* FZE

Inspection Jalur menggunakan MFL untuk survei kehilangan logam:

Untuk PT Internusa Perkasa Teknik (Inpernik) Q.AP.12.007 v02 I

JBB

Proyek: PT PERTAMINA GAS - Jawa Bagian Barat 14 "x34 km

Balongan – KHT 14 "59,7 km KHT - Cilamaya DATE: 30 Agustus

2012

a) Kewajiban Kontraktor (PT. NDT Middle East FZE)

- I Kewajiban KONTRAKTOR wajib melaksanakan layanan dan melaksanakan kewajibannya di bawah ini dengan uji tuntas, efisiensi dan ekonomi sesuai dengan teknik dan praktik yang diterima secara umum yang digunakan dalam industri dan harus mengamati manajemen yang baik dan praktik Teknik teknis, dan menggunakan teknologi maju yang tepat.
- II KONTRAKTOR menjamin bahwa peralatan yang disediakan dalam keadaan yang baik dan berfungsi dan memiliki sejarah operasi yang terbukti berhasil dalam kinerja pekerjaan yang sifatnya serupa. Personil KONTRAKTOR harus melaksanakan semua layanan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek dengan cara yang profesional dan seperti pekerja.
- III KONTRAKTOR harus dibantu oleh personel PERUSAHAAN dalam pelaksanaan pekerjaan seperti peluncuran, pengoperasian, dan pengendalian alat-alat, yang harus

dikesampingkan sesuai dengan konstruktor KONTRAKTOR untuk memungkinkan KONTRAKTOR memberikan hasil survei yang memuaskan.

- IV. Setelah menyelesaikan pekerjaan, KONTRAKTOR akan menyerahkan kepada PERUSAHAAN Laporan Inspeksi pada hasil sesuai dengan Kontrak. Tunduk pada kewajiban berkelanjutan dari para pihak disepakati bahwa pengiriman Laporan Inspeksi dan penerimaan oleh PERUSAHAAN, yang tidak akan lebih dari 6 (enam) minggu setelah pengiriman, akan merupakan penyelesaian kewajiban KONTRAKTOR di bawah Kontrak.
- V. Laporan Inspeksi dan rekomendasi lain yang dibuat oleh KONTRAKTOR yang berkaitan dengan pipa harus disiapkan oleh KONTRAKTOR untuk yang terbaik dari pengetahuan dan keyakinan KONTRAKTOR. Semua rekomendasi dibuat dengan itikad baik dan merupakan pendapat ahli yang andal tentang KONTRAKTOR, sesuai dengan praktik umum yang berlaku di industri pipa. Laporan Inspeksi atau tindakan berdasarkan itu tidak akan merupakan jaminan kualitas, kapasitas, keamanan atau kebugaran untuk tujuan pipa. Para pihak dengan ini setuju bahwa tidak ada keputusan yang berkaitan dengan pemeliharaan saluran pipa. atau keputusan yang melibatkan keuangan, investasi atau risiko apa pun

lainnya untuk keselamatan pipa, harus sepenuhnya didasarkan pada Laporan Inspeksi.

- VI. Dalam melakukan pekerjaan, KONTRAKTOR harus mematuhi dan mematuhi peraturan dan ketentuan keselamatan yang berlaku.

b) Kewajiban Perusahaan (PT. Internusa Perkasa Teknik)

- i. PERUSAHAAN akan menunjuk seorang wakil yang bertanggung jawab atas proyek dengan bahasa Inggris yang baik. Orang ini atau wakil yang berwenang harus mewakili PERUSAHAAN selama jalannya proyek dan akan berwenang untuk menandatangani Laporan Inspeksi yang disampaikan oleh KONTRAKTOR.
- ii. PERUSAHAAN tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan pada peralatan inspeksi yang disebabkan oleh kelalaian KONTRAKTOR.
- iii. PERUSAHAAN harus memastikan bahwa tidak ada penghalang di dalam dan di sekitar pipa yang akan menghambat kinerja peralatan inspeksi. PERUSAHAAN bersatu dengan kelengkapan dan akurasi dari informasi relatif terhadap pipa dan daerah sekitarnya langsung mengenai kinerja layanan.
- iv. PERUSAHAAN harus mengatur provisor fasilitas peluncuran dan penerimaan yang sesuai untuk peralatan KONTRAKTOR.

- v. Saluran pipa harus dibersihkan sejauh yang diperlukan untuk mendapatkan data yang berguna. Dalam hal KONTRAKTOR melakukan semua atau sebagian dari pembersihan dan / atau memberikan alat pembersih, tanggung jawab keseluruhan PERUSAHAAN untuk menyediakan pipa bersih tetap berlaku dan memiliki kekuatan penuh.
- vi. PERUSAHAAN bertanggung jawab untuk pengoperasian saluran pipa dan harus memastikan bahwa informasi KONTRAKTOR untuk masing-masing peralatan inspeksi seperti kecepatan alat terpenuhi. PERUSAHAAN harus menyediakan personel yang diperlukan dan peralatan pengangkat untuk penanganan peralatan. Dalam bahasa yang tidak berbahasa Inggris negara, PERUSAHAAN harus memastikan ketersediaan personil dengan bahasa Inggris yang baik. Personil PERUSAHAAN harus selalu berada di bawah kendali dan manajemen PERUSAHAAN.
- vii. PERUSAHAAN harus bertanggung jawab atas tindakan keamanan untuk peralatan di lapangan dan memastikan keselamatan personel KONTRAKTOR sesuai dengan tugas hukumnya.
- viii. PERUSAHAAN dengan biayanya melakukan semua pekerjaan yang diperlukan untuk menempatkan peralatan pembandingan di lokasi yang akan ditentukan dengan kesepakatan bersama antara KONTRAKTOR dan PERUSAHAAN.

ix. Jika pipa tidak sesuai dengan representasi PERUSAHAAN dan peralatan KONTRAKTOR menjadi tersangkut atau hilang dalam pipa karena kondisi buruk di pipa, seperti namun tidak terbatas pada, maloperasi katup atau bahaya tak terduga serupa yang tidak dapat diatribusikan ke KONTRAKTOR, ketentuan berikut akan berlaku:

1) PERUSAHAAN harus menanggung semua dan semua biaya untuk memulihkan peralatan termasuk, tanpa batasan, biaya penggalian. PERUSAHAAN juga akan membayar semua biaya perbaikan apabila peralatan tersebut rusak melebihi pemakaian normal. Jika biaya perbaikan yang wajar cenderung melebihi nilai penggantian dari peralatan lengkap, PERUSAHAAN akan bertanggung jawab atas biaya penggantian dikurangi jumlah yang dapat dipulihkan oleh KONTRAKTOR berdasarkan kebijakan insuransinya.

2) Dalam hal pemulihan tidak dilakukan dalam waktu tunggu dari waktu ketika peralatan menjadi tersangkut atau hilang dalam pipa, PERUSAHAAN akan bertanggung jawab atas biaya penggantian dikurangi hasil asuransi yang dapat diperoleh kembali oleh KONTRAKTOR.

3) Dalam hal PERUSAHAAN mengganti rugi KONTRAKTOR untuk setiap peralatan yang hilang yang kemudian dipulihkan, PERUSAHAAN harus mengembalikan peralatan ke KONTRAKTOR dan

KONTRAKTOR akan mengembalikan kepada PERUSAHAAN jumlah yang dibayarkan kepada KONTRAKTOR untuk kehilangan peralatan dikurangi nilai sewanya yang wajar peralatan untuk periode itu ditempatkan di pipa dan setiap biaya perbaikan yang wajar dari kerusakan peralatan.

- x. PERUSAHAAN juga akan mengganti KONTRAKTOR untuk peralatan tambahan yang disediakan dan tidak dikembalikan oleh personel PERUSAHAAN.
- xi. PERUSAHAAN akan menyediakan ruang kantor yang sesuai, akses ke perangkat komunikasi dan bengkel dengan alat pengangkat sebagai basis kerja, semua transportasi untuk peralatan inspeksi dan awak saat berada di negara operasi, dan membayar untuk penginapan yang sesuai dengan standar yang sebanding ke hotel kelas barat westem untuk kru KONTRAKTOR.
- xii. PERUSAHAAN akan membuat impor dan mengekspor kembali formalitas bea cukai dan menyelesaikan biayanya semua bea, biaya administrasi dan biaya yang serupa, biaya bea cukai, retribusi dan bea lain yang dikenakan sehubungan dengan proyek. PERUSAHAAN harus menanggung, melepaskan, dan mengganti kerugian kepada KONTRAKTOR untuk setiap pajak yang dikenakan di negara operasi yang timbul dari kinerja Kontrak. Pajak pertambahan nilai atau

hutang pajak omset harus ditambahkan ke dalam jumlah kontrak.

- xiii. PERUSAHAAN harus mematuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan strategi dan standar keamanan yang dapat diterima secara umum di dalam industri untuk mencegah personil KONTRAKTIR dan peralatan dari terpapar bahaya keamanan apa pun. Secara khusus, PERUSAHAAN harus memastikan bahwa peluncuran dan penerimaan tmps dibersihkan dengan nitrogen dan detektor gas portable disediakan (jika diperlukan). Setiap penyimpangan dari prosedur peluncuran standar KONTRAKTOR harus disetujui oleh KONTRAKTOR.

Dari kontrak kerja antara PT. NDT Middle East FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik dapat disimpulkan, bahwa dalam kontrak ini yang menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. *NDT Middle East FZE* adalah:

1. Pembersihan Pipa Gas
2. Pemeriksaan geometri
3. Pengukuran ketebalan dinding korosi / MFL Teknologi
4. Tepat sesuai dengan tujuan/fungsinya
5. Presentasi Laporan Akhir dalam premis
6. Pelatihan di Jakarta
7. Pelaporan

Melalui kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tersebut maka hal ini menjadi acuan terlaksananya prestasi antara PT. NDT *Middle East FZE* dan PT. Internusa Perkasa Teknik.

Penolakan:

Laporan Inspection dan rekomendasi lain yang dibuat oleh PT. NDT *Middle East FZE* yang berhubungan dengan pipa harus disiapkan oleh PT. NDT *Middle East FZE* sesuai pengetahuan dan keyakinan PT. NDT *Middle East FZE*. Semua rekomendasi dibuat dengan itikad baik dan merupakan pendapat ahli yang amdal tentang PT. NDT *Middle East FZE*, sesuai dengan praktik umum yang berlaku di industri pipa. Laporan Inspection atau tindakan berdasarkan itu tidak akan merupakan jaminan kualitas, kapasitas, keamanan atau kebugaran untuk tujuan pipa. Para pihak dengan ini setuju bahwa tidak ada keputusan yang berkaitan dengan pemeliharaan saluran pipa, atau keputusan yang melibatkan keuangan, investasi atau risiko apa pun lain nya untuk keselamatan pipa saluran, harus semata-mata didasarkan pada Laporan Inspeksi.

Di dalam kontrak kerja antara PT. NDT *Middle East FZE*

dan PT. Internusa Perkasa Teknik menentukan adanya penolakan bahwa PT. NDT *Middle East* FZE menolak keputusan yang berkaitan dengan pemeliharaan saluran pipa, atau menolak keputusan yang melibatkan



keuangan, investasi, atau risiko apa pun lain nya untuk keselamatan pipa saluran yang tidak didasarkan pada laporan inspeksi.

Terdapat 18 Pasal yang ada di dalam kontrak kerja antara PT. NDT *Middle East* FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini terdapat di dalam Pasal 1 ayat 2 dan 4 kontrak kerja proyek konstruksi antara PT. NDT *Middle East* FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik yaitu:

Pasal 1 Ayat 2 Kontrak Kerja PT. NDT Middle East FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik

“CONTRACTOR warrants that the equipment supplied is in a good and functional state and has a proven history of successful operations in the performance of work of a similar nature. CONTRACTOR personnel shall carry out all services necessary for the implementation of the project in a professional and workmanlike manner.”

Atau

“KONTRAKTOR menjamin bahwa peralatan yang disediakan dalam keadaan yang baik dan berfungsi dan memiliki sejarah operasi yang terbukti berhasil dalam kinerja pekerjaan yang sifatnya serupa. Personil KONTRAKTOR harus melaksanakan semua layanan yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek dengan cara yang professional dan seperti pekerja”.

Pasal 1 ayat 4 Kontrak Kerja PT. NDT Middle East FZE dan PT.

Internusa Perkasa Teknik

“The Inspection Report and any other recommendations made by CONTRACTOR relating to the pipeline shall be prepared by CONTRACTOR to the best of CONTRACTOR'S knowledge and belief. All recommendations are made in good faith and are a reliable expert opinion of CONTRACTOR, according to common practice prevailing in the pipeline industry. The Inspection Report or measures based on it will not constitute a warranty of the quality, capacity, safety or fitness for purpose of the pipeline. The parties hereby agree that no decisions with regard to maintenance of the pipeline, nor decisions involving financial, investment or any other risk whatsoever for the safety of the pipeline, shall be solely based on the Inspection Report.”

Atau

“setelah menyelesaikan pekerjaan, KONTRAKTOR akan menyerahkan kepada perusahaan hasil laporan inspeksi sesuai dengan kontrak. Tunduk pada kewajiban berkelanjutan dari para pihak disepakati bahwa pengiriman laporan inspeksi dan penerimaan oleh perusahaan, yang tidak akan lebih dari 6 (enam) minggu setelah pengiriman, yang merupakan penyelesaian kewajiban kontraktor di bawah kontrak.”

Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa PT. NDT *Middle East FZE* menjamin bahwa peralatan yang disediakan dalam keadaan yang berfungsi dengan baik dan PT. NDT *Middle East FZE* wajib menyerahkan kepada PT. Internusa Perkasa Teknik hasil laporan inspeksi sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati kedua belah pihak namun setelah di periksa lebih lanjut oleh PT. Internusa Perkasa Teknik, hasil laporan inspeksi PT. NDT *Middle East FZE* dengan hasil pemeriksaan langsung dilapangan hasilnya berbeda.

2. Analisis Kontrak Perjanjian antara PT. Internusa Perkasa Teknik dan PT. NDT *Middle East FZE*

Untuk melakukan Analisa pertama-tama kita harus memahami penyebab dari kasus ini. Kasus ini bermula dari PT. NDT *Middle East FZE* dan PT. Internusa Perkasa Teknik yaitu PT. Internusa Perkasa Teknik memiliki kontrak dengan PT Pertamina Gas. PT. Pertamina gas selaku pemberi proyek, memberikan proyek kaliper ⁴² dan cek indikasi karena terjadi adanya *Illegal Tapping* (penyadapan ilegal). PT. Internusa Perkasa Teknik terikat dalam sebuah perjanjian dengan PT NDT *Middle East FZE* selaku Subkontraktor yang telah di tanda tangani secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2012. PT. Internusa Perkasa Teknik bertindak sebagai Kontraktor dan PT NDT *Middle East FZE* bertindak sebagai Subkontraktor. Atas dasar perjanjian tersebut kemudian PT Internusa Perkasa Teknik mengeluarkan *service order* pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan subyek “*Deformation Instead Caliper*” dan meminta PT NDT melakukan inspeksi kaliper 45 bagian atau kurang dari 265 km x 8 jalur pipa tempino – plaju dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 180 (seratus delapan puluh) kali. PT. NDT *Middle East FZE* awalnya memberikan somasi melalui Advokat nya kepada pihak PT. Internusa Perkasa Teknik kerana PT Internusa Perkasa Teknik belum juga melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PT. NDT *Middle East FZE* dan mengancam akan memproses somasi tersebut ke jalur

⁴² Kaliper merupakan alat ukur langsung yang dapat digunakan untuk mengukur bidang dalam, bidang luar, jarak antar bidang dan bidang bertingkat.

hukum apabila tidak juga melakukan pembayaran. Namun didalam surat klarifikasi somasi dari PT. NDT *Middle East FZE* kepada PT. Internusa Perkasa Teknik yang diwakili oleh Advokat nya, PT. Internusa Perkasa Teknik mengalami kebingungan mengenai data yang disampaikan bahwa di dalam surat somasi selalu berubah-ubah. Oleh karena itu PT. Internusa Perkasa Teknik meminta kepada pihak subkontraktor yaitu PT. NDT *Middle East FZE* memberikan rincian yang berkesuaian di dalam somasi. Terdapat alasan mengapa PT. Internusa Perkasa Teknik belum juga memberikan pembayaran kepada PT. NDT *Middle East FZE* karena peralatan PT. NDT *Middle East FZE* tidak berfungsi. *Service Order* yang diberikan kepada PT. NDT *Middle East FZE* tidak dijalankan dengan sempurna oleh PT. NDT *Middle East FZE*. Pada tanggal 12 Mei 2014 PT. Internusa Perkasa teknik mengirimkan email kepada PT. NDT *Middle East FZE* perihal butuh penjelasan dikarenakan adanya ketidak cocokan data namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti dan tidak ada respon dari pihak PT. NDT *Middle East FZE* karena terjadi perbedaan antara data antara hasil Analisa alat *defarmantion* dengan fakta di lapangan. Oleh sebab itu PT. Intenusa Perkasa Teknik beranggapan bahwa PT. NDT tidak berhak atas pembayaran *Invoice* terhadap pekerjaan didalam *Service Order*. Sesuai dengan Surat Klarifikasi dari PT. Internusa Perkasa Teknik, beranggapan bahwa PT. NDT *Middle East FZE* belum menyelesaikan pekerjaan yang diminta didalam *Service Order* dikarenakan alat yang digunakan oleh PT. NDT *Middle East FZE* dalam melakukan pekerjaan tidak bekerja dengan baik, sehingga terjadi perbedaan antara hasil analisa alat *defarmation* dengan fakta di lapangan.

Hal itu membuat PT. Internusa Perkasa Teknik mengambil subkontraktor lain karena PT. Internusa Perkasa Teknik mendapatkan Proyek baru dari PT. Pertamina Gas di lain area yang mengharuskan menyelesaikan proyek sebelumnya. Apabila tidak diselesaikan sesuai kontrak berakibat Blacklist terhadap PT. Internusa Perkasa Teknik dari PT. Pertamina Gas. Akibatnya timbul lah perselisahan antara PT. Internusa Perkasa teknik dengan PT. NDT *Middle East FZE*.

Berdasarkan kasus diatas kelalaian yang dilakukan oleh PT. NDT Middle East FZE berujung pada keterlambatan penyelesaian proyek konstruksi dan hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berikut ini merupakan uraian kelalaian dari pihak PT. NDT Middle East FZE:

1. PT. NDT Middle East FZE telah mempresentasikan alat yang akan digunakan untuk pencarian titik *Illegal Tapping* (penyadapan illegal), alat tersebut adalah *Caliper Pig* sebagaimana dibuktikan dalam *Minutes Of Meeting* (MOM), pada tanggal 12 September 2013.
2. Pada Oktober 2013 telah dilakukan peluncuran alat Defarmation, namun alat tersebut hanya mampu menganalisa data sepanjang 4 km, yang seharusnya 45 km dikarenakan alat tersebut rusak dan menunggu *Spare Part* dari PT. NDT *Middle East FZE*.
3. Email tanggal 27 Oktober 2013, PT. NDT *Middle East FZE* mengatakan bahwa alat yang digunakan yaitu *Calliper Pig* tidak

sesuai dengan pekerjaan tersebut, PT. NDT *Middle East FZE*

merekomendasikan untuk mengganti alat dengan MFL.

4. Di dalam pekerjaan sebagaimana diperintahkan melalui *Service Order*, Pihak PT. NDT *Middle East FZE* sudah memberikan *Final Report* kepada PT. Internusa Perkasa Teknik, hasil *Final Report* disampaikan bahwa alat yang berasal dari PT. NDT *Middle East FZE* telah menemukan beberapa titik terjadinya *Illegal Tapping* (penyadapan ilegal), atas dasar hal tersebut maka PT. Internusa Perkasa Teknik melakukan penggalian informasi, namun ternyata setelah PT. Internusa Perkasa Teknik melakukan penggalian informasi sesuai dengan titik yang ditentukan alat PT. NDT *Middle East FZE*, tidak diketemukan *Illegal Tapping* (penyadapan ilegal). Hal ini menimbulkan keraguan dari PT. Internusa Perkasa Teknik terhadap alat yang diberikan oleh PT. NDT *Middle East FZE*.
5. Atas dasar hal tersebut maka pada tanggal 12 Mei 2014, PT. Internusa Perkasa Teknik mengirimkan Email kepada PT. NDT *Middle East FZE* perihal butuh penjelasan dikarenakan adanya ketidakcocokan data namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PT. NDT *Middle East FZE* dan tidak ada respon dari PT. NDT *Middle East FZE*.

Berdasarkan point 1 (satu) sampai dengan point 5 (lima) dapat dibuktikan bahwa PT. NDT *Middle East FZE* terbukti melakukan wanprestasi karena sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, PT. NDT *Middle East FZE* seharusnya dapat menyelesaikan pipa yang

digunakan sepanjang 45 km namun hanya berhasil dikerjakan sebanyak 4 km.

Berdasarkan penjelasan Ahmadi Miru terkait wanprestasi, Ahmadi Miru menjelaskan bahwa wanprestasi itu dapat berupa ⁴³:

1. Sama sekali tidak memenuhi Prestasi

Di dalam kasus ini pihak dari PT. NDT *Middle East* FZE telah memenuhi prestasi nya tetapi hanya mampu menganalisa data sepanjang 4 km dimana di dalam perjanjian seharusnya 45 km.

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna

Di dalam kasus ini pada final order pada tanggal 27 oktober 2013 hasil yang di berikan oleh PT. NDT *Middle East* FZE kepada PT. Internusa Perkasa Teknik berbeda dengan hasil yang ada di lapangan. Diketahui bahwa alat yang diberikan oleh PT. NDT *Middle East* FZE hanya mampu bekerja sepanjang 4 km, hal ini berbeda dengan apa yang sudah tertulis di dalam perjanjian bahwa di dalam perjanjian tertulis alat dari PT. NDT *Middle East* FZE harus dapat bekerja sepanjang 45 km. Menurut Ahmadi Miru tentang wanprestasi point ke 2 (dua) menjelaskan bahwa wanprestasi dapat berupa prestasi yang dilakukan tidak sempurna, maka di dalam kasus ini dapat di simpulkan bahwa PT. NDT *Middle East* FZE telah menjalankan prestasi nya namun tidak dilakukan dengan sempurna.

⁴³ Ahmad Miru, *Op. Cit*, hlm. 74

3. Terlambat memenuhi prestasi

Di dalam kasus ini PT. NDT *Middle East* dapat dikatakan terlambat memenuhi prestasi nya karena PT. NDT *Middle East* FZE telah lalai melakukan pekerjaannya. Pada tanggal 12 Mei 2014, PT. Internusa Perkasa Teknik telah mengirimkan email kepada PT. NDT *Middle East* FZE perihal butuh penjelasan akibat ketidakcocokan data yang diberikan oleh PT. NDT *Middle East* FZE dan hasil yang ada di lapangan, namun tidak ada respon dari PT. NDT *Middle East* FZE dan hasil pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh PT. NDT *Middle East* FZE tidak dilanjutkan. Berdasarkan penjelasan Ahmadi miru tentang wanprestasi point ke 3 (tiga) menjelaskan bahwa wanprestasi juga dapat berupa terlambat dalam memenuhi prestasi nya, maka di dalam kasus ini dapat di simpulkan bahwa PT. NDT *Middle East* FZE terlambat memenuhi prestasi nya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak.

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang dilakukan

Berdasarkan penjelasan Ahmadi Miru tentang wanprestasi yang tertera di dalam point ke 4 (empat) menjelaskan bahwa wanprestasi dapat berupa melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang dilakukan. Di dalam kasus ini, PT. NDT *Middle East* FZE tidak melakukan apa yang di dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Hanya saja, barang dari PT. NDT *Middle East* FZE yang tidak

dapat berfungsi dengan baik dan mengakibatkan keterlambatan pekerjaan pada proyek konstruksi.

Di dalam kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi dalam mengatur prestasi para pihak setidaknya harus mengatur klausul-klausul sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Jasa Konstruksi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Jasa Konstruksi, syarat-syarat yang harus ada dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi telah diatur disana.

*“A condition of the contract is a term which is (or is agreed to be) so fundamental to the contract’s operation that without it the other party cannot carry out its obligation or its ability to do so is profoundly and seriously affected.”*⁴⁴

Atau

“Kondisi kontrak adalah istilah yang (atau disetujui) sangat mendasar bagi operasi kontrak sehingga tanpa itu pihak lain tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau kemampuannya untuk melakukan nya hal tersebut sangat dipengaruhi dan sangat berat”.

Sehingga dalam hal ini syarat-syarat tersebut telah disepakati oleh para pihak dan dibuat menjadi klausul- klausul dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi. klausul lain selain syarat-syarat yang harus ada dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi, yaitu:

*“An innominate term is the most common. It is a term the breach which does not necessarily have profound effect upon the ability of the other party to perform its obligations, but, depending upon seriousness may do so.”*⁴⁵

Atau

“Istilah innominate adalah yang paling umum. Ini adalah istilah pelanggaran yang tidak selalu memiliki efek mendalam pada

⁴⁴ Richard Wilmot – Smith, *Construction Contracts : Law and Practice*, Oxford University Press, New York, 2010, hlm.240.

⁴⁵ *Ibid.*

kemampuan pihak lain untuk melakukan kewajiban, tetapi, tergantung pada keseriusan dapat melakukannya.”

Sehingga dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa klausul selain syarat-syarat yang harus ada dalam Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi dapat disebut sebagai *innominate terms*. Berkaitan dengan adanya wanprestasi terhadap klausul ini maka dalam hal upaya wanprestasi harus diatur pula mengenai penggantian kerugian dalam hal pelanggaran klausul ini. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi memberikan definisi mengenai wanprestasi beserta kondisi-kondisi yang dapat dikatakan sebagai wanprestasi, yaitu:

Kemudian mengenai tanggung jawab yang harus diberikan oleh debitur yang lalai atau ingkar janji juga telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, yaitu Tanggung jawab antara lain berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan/atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.

Penyelenggara jasa konstruksi juga wajib menyerahkan hasil pekerjaannya sesuai dengan standar mutu bahan, tepat biaya, dan tepat waktu. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menyebutkan bahwa:

“Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atas Sub penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi”.

Berdasarkan pasal diatas apabila dikaitkan dengan kasus PT. NDT Middle East FZE masalah yang dialami dalam proyek konstruksi tersebut PT. NDT *Middle East FZE* selaku subkontraktor telai lalai melakukan pekerjaannya karena tidak dapat menyelesaikan prestasi nya yaitu tidak bisa menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat mutu karena alat yang digunakan oleh PT. NDT Middle East FZE tidak dapat berfungsi dengan baik, sehingga terjadi perbedaan antara hasil Analisa alat *defarmation* dengan fakta di lapangan. PT. NDT Middle East FZE juga tidak bisa mengerjakan pekerjaannya secara tepat waktu karena berdasarkan hasil *Final Report* pada tanggal 12 Mei 2014 PT. Internusa Perkasa Teknik melakukan pemeriksaan namun pekerjaan dan alat yang diberikan oleh PT. NDT *Middle East FZE* tidak dapat berfungsi dengan baik yang menimbulkan adanya keraguan dari PT. Internusa Perkasa Teknik terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh PT. NDT Middle East FZE.

3. Perlindungan Hukum bagi PT. Internusa Perkasa Teknik terhadap wanprestasi PT. NDT Middle East FZE atas keterlambatan proyek konstruksi.

Mendapat perlindungan hukum merupakan harapan setiap subyek hukum dalam suatu perjanjian. Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak dan kewajiban seseorang. Pengertian

perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk khususnya bagi rakyat Indonesia, Phillipus M, Hadjon membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif
2. Perlindungan Hukum Represif

1) Teori Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu- rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi

“Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.”

Di dalam pasal diatas telah dijelaskan bahwa sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu. Namun, karena pelanggaran tersebut sudah terjadi maka perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada PT. Internusa Perkasa Teknik adalah dengan cara perlindungan hukum represif

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam proses penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sedangkan untuk perlindungan represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi.

Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang

Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa:

“Penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.”

Di dalam pasal diatas dijelaskan bahwa sub penyedia jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu mendapat perlindungan hukum yaitu pihak sub penyedia jasa dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kontrak kerja kedua belah pihak. Di dalam kontrak kerja antara PT. NDT *Middle East FZE* dan PT. Internusa Perkasa Teknik menjelaskan bahwa apabila kontraktor tidak dapat memenuhi prestasi nya sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat maka pihak kontraktor akan bertanggung jawab atas kelalaiannya yang terdapat di dalam Pasal 9 ayat (1) sebagai berikut:

“CONTRACTOR shalt be liable for all damage incuned by COMPANY to the extent that CONTRACTOR caused such danrage by gross negligence or willful misconduct.”

Atau

“KONTRAKTOR akan bertanggung jawab atas semua kerusakan yang ditanggung oleh PERUSAHAAN sejauh bahwa KONTRAKTOR menyebabkan kerusakan seperti itu oleh kelalaian berat atau kesalahan yang disengaja.”

Di dalam Pasal 9 ayat 1 kontrak kerja antara PT. NDT *Middle East FZE* dan PT. Internusa perkasa Teknik dijelaskan bahwa pihak dari PT. NDT *Middle East FZE* akan bertanggung jawab atas semua kerusakan apabila terjadi kelalaian dari pihak PT. NDT *Middle East FZE*.

Terjadinya gejala awal kredit bermasalah yang bisa berupa penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit, dan juga menurunnya sikap kooperatif dari debitor dalam artian debitor melakukan

wanprestasi,⁴⁶ sehingga menyebabkan kredit tersebut bermasalah maka sebagai upaya dalam pemenuhan hak bagi PT. Internusa Perkasa Teknik terhadap wanprestasi dari PT. NDT *Middle East FZE* penangannya dapat dilakukan dengan perlindungan hukum represif yaitu upaya hukum litigasi dan non litigasi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Litigasi

Litigasi adalah model penyelesaian sengketa dengan membawa sengketa tersebut ke Pengadilan. Kadang dalam sengketa keperdataan hal ini adalah hal terakhir yang ditempuh apabila model penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak menemui kesepakatan diantara kedua belah pihak. Tapi tidak jarang juga kita menemui sebuah kontrak yang langsung menggunakan litigasi sebagai satu-satunya model penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian tersebut. Di dalam kasus ini, PT. NDT Middle East FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik tidak membawa sengketa nya dengan jalur pengadilan.

⁴⁶ Dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka kreditor dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut:

- a) dapat menuntut pembatalan perjanjian
- b) dapat menuntut pemenuhan perjanjian
- c) dapat menuntut penggantian kerugian
- d) dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian
- e) dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian

(Afifah Kusumadara. Bahan Kuliah Hukum Perikatan, *Loc. Cit.*, hlm. 46)

b. Non-litigasi (*Alternative Dispute Resolution*)

Mekanisme penyelesaian sengketa ini disebut sebagai non-litigasi karena merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar lembaga peradilan. PT. NDT Middle East FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik melakukan penyelesaian sengketa tersebut dengan jalur non litigasi. Ada 4 (macam) metode penyelesaian sengketa non-litigasi yaitu :

- Arbitrasi

Berdasarkan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka (1) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa Perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;

- Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa secara damai dimana ada keterlibatan pihak ketiga yang netral (mediator) , yang secara aktif membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak;

- Negosiasi

Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan komunikasi dua arah dari kedua belah pihak yang bersengketa untuk merumuskan sebuah kesepakatan bersama

- Konsiliasi

Upaya untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian bersama.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis semua permasalahan sengketa yang terjadi kepada PT. Internusa Perkasa Teknik dapat diselesaikan melalui non-litigasi atau biasa disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Berdasarkan pada Undang-Undang diatas, PT. Internusa perkasa Teknik menggunakan cara negosiasi yang penyelesaiannya melibatkan para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.⁴⁷ Dalam pelaksanaan negosiasi, PT. Internusa Perkasa Teknik mengundang PT. NDT Middle East FZE selaku Subkontraktor untuk melakukan negosiasi dengan membahas ketidakcocokan hasil yang diterima dengan keadaan dilapangan. Pelaksanaan negosiasi tersebut dihadiri oleh 2 (dua) pihak yaitu PT. Internusa Perkasa Teknik dan PT. NDT Middle East FZE. Durasi negosiasi

⁴⁷ Frans Hendra Winarta, **Hukum Penyelesaian Sengketa**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 7-8.

yang dilakukan oleh kedua belah pihak berlangsung selama 4 (empat) jam.⁴⁸

PT. Internusa Perkasa Teknik juga biasa melakukan penyelesaiannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antar pihak sehingga permasalahan klaim tersebut tidak berlanjut di pengadilan. Berdasarkan penjelasan pelaksanaan penyelesaian tersebut, hasil dari pelaksanaan negosiasi yang dilakukan oleh PT. Internusa Perkasa Teknik dengan PT. NDT Middle East FZE adalah PT. NDT Middle East FZE sepakat untuk membayar selisih kerugian yang ditetapkan oleh PT. Internusa Perkasa Teknik sehingga tidak terjadi sengketa dalam permasalahan klaim tersebut. Kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan tersebut, maka pihak dari PT. Internusa Perkasa Teknik selaku kontraktor dapat mengajukan upaya penyelesaiannya melalui litigasi.⁴⁹

4. Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. NDT *Middle East* FZE selaku Subkontraktor terhadap keterlambatan proyek konstruksi.

Sebagaimana fakta yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Keterlambatan proyek konstruksi yang dilakukan oleh pihak PT. NDT

⁴⁸ Iswan Rasjudin, Wawancara Pribadi, Kepala Biro Hukum PT. Internusa Perkasa Teknik, 5 Juni 2018

⁴⁹ Iswan Radjudin, Wawancara Pribadi, Kepala Biro Hukum PT. Internusa Perkasa Teknik, 5 Juni 2018

Middle East FZE selaku Subkontraktor kepada pihak Kontraktor yaitu PT. Internusa Perkasa Teknik mengakibatkan adanya Tanggung Jawab Hukum atas pekerjaannya yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah dibuat. Dalam Kitab Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang jasa Konstruksi telah dijelaskan dalam beberapa pasal terkait dengan tanggung jawab kontrak kerja konstruksi diantaranya adalah:

Pasal 59 ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang jasa

Konstruksi

“Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

1. standar mutu bahan;
2. standar mutu peralatan;
3. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
4. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
5. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
6. standar operasi dan pemeliharaan;
7. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa

Konstruksi

“Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.”

Di dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No.

2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa dalam setiap

penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan/atau penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang salah satunya mencakup tentang standar mutu bahan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa

Konstruksi

“Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa wajib memberikan ganti kerugian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Di dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa penyedia jasa dan/atau pengguna jasa wajib bertanggung jawab atas kelalaian yang telah dibuat oleh salah satu pihak yang terikat di dalam kontrak. Tanggung jawab yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang telah dilakukan.

Mengenai tanggung jawab atau kewajiban untuk ganti kerugian yang disebabkan karena kelalaian seseorang telah diatur dalam pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

Berdasarkan penjabaran peraturan perundang-undangan tersebut tanggung jawab yang harus dilakukan oleh PT. NDT *Middle East* FZE dalam keterlambatan proyek konstruksi antara lain:

1. PT. NDT *Middle East* FZE diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur.

2. Apabila perikatan itu timbal balik. PT. Internusa Perkasa Teknik dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim.
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada PT. Internusa Perkasa Teknik sejak terjadi wanprestasi.
4. PT. NDT *Middle East* FZE diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.
5. PT. NDT *Middle East* FZE wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Hal-hal yang sudah jelaskan diatas berdasarkan pada Undang-Undang yang ada serta melalui kontrak perjanjian yang ada menimbulkan permintaan tersebut sebagai ganti rugi dari PT. NDT *Middle East* FZE kepada PT Internusa sebagai bentuk pemenuhan prestasi yang sudah dirugikan terutama dalam kasus ini telah terjadi sengketa antara kedua belah pihak.

5. Pilihan Hukum Dalam Suatu Kontrak (*Choice Of Law*)

Didalam kontrak kerja antara PT. NDT *Middle East* FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik Pasal 18 (ii) mengatakan bahwa:

“The Contract shall be govermed and construed in accordance with the laws of England.”

Atau

“Kontrak akan diatur dan disesuaikan dalam hukum Inggris”

Choice Of Law atau pilihan hukum yang diajukan oleh pihak PT. NDT *Middle East FZE* untuk menyesuaikan kontrak kerja yang telah disepakati para pihak diatur di dalam hukum Inggris. Maka dari itu, suatu harmonisasi hukum apa yang akan terjadi bila menggunakan pilihan hukum (*Choice Of Law*) dalam suatu kontrak apabila salah satu pihak melanggar kebijakan fundamental dari negara lain yang lebih besar kepentingannya terhadap keputusan pokok.

Pilihan hukum hanya dibenarkan dalam bidang hukum perjanjian. Tidak dapat diadakan pilihan hukum di bidang hukum kekeluargaan misalnya.⁵⁰ Masalah pilihan hukum yang akan diberlakukan atau diterapkan adalah salah satu masalah yang penting dalam suatu kontrak perdagangan internasional. Istilah-istilah pilihan hukum dalam bahasa lain antara lain adalah: *Partij autonomie, autonomie des parties* (Perancis), *intension of the parties* (Inggris) atau (*choice of law*). Para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan, mereka dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak mereka. Para pihak dapat memilih hukum tertentu.⁵¹

Pilihan hukum merupakan hukum mana yang akan digunakan dalam pembuatan suatu kontrak.⁵² Para pihak yang mengadakan perjanjian dagang berhak melakukan kesepakatan tentang pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*) yang berlaku bagi perjanjian tersebut.

⁵⁰ Sudargo Gautama, **Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia**, Bandung: Penerbit Binacipta, cet. Ke-5, 1987, hlm. 204

⁵¹ *Ibid*, hlm 168

⁵² Salim S. **Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak**, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, cet. Ke-3 2006, hlm. 106

Pilihan hukum (*choice of law*) menentukan hukum yang berlaku (*governing law*), demikian pula, pilihan forum arbitrase (*arbitrase clause*) menentukan yurisdiksi forum penyelesaian sengketa.⁵³

Peran *choice of law* di sini adalah hukum yang akan digunakan oleh badan peradilan untuk:

- a. Menentukan keabsahan suatu kontrak dagang,
- b. Menafsirkan suatu kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak,
- c. Menentukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu prestasi (pelaksanaan suatu kontrak dagang),
- d. Menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap kontrak.⁵⁴

Hukum yang akan berlaku ini dapat mencakup beberapa macam hukum. Hukum-hukum tersebut adalah: hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa (*applicable substantive law* atau *lex causae*) dan hukum yang akan berlaku untuk persidangan (*procedural law*).

Hukum yang akan berlaku akan sedikit banyak bergantung pada kesepakatan para pihak. Hukum yang akan berlaku tersebut dapat berupa hukum nasional suatu Negara tertentu. Biasanya hukum nasional tersebut ada atau terkait dengan nasionalitas salah satu pihak. Cara pemilihan inilah yang lazim diterapkan dewasa ini. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak sepakat mengenai salah satu hukum nasional tersebut, biasanya kemudian mereka akan berupaya mencari hukum nasional yang relative

⁵³ Basuki Rekso Wibowo, **Kompetensi Peradilan Umum Terhadap Putusan Arbitrase**, librari@lib.unair.ac.id, 1 Januari 1999

⁵⁴ Adolf, **Hukum Perdagangan Internasional**, hlm. 214

lebih netral. Alternatif lainnya yang memungkinkan dalam hukum perdagangan internasional adalah menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan dan kelayakan (*ex aequo et bono*) namun demikian penerapan prinsip ini pun harus berdasarkan pada kesepakatan para pihak.⁵⁵ Pilihan hukum sekarang ini sudah umum diterima dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional, baik oleh negara-negara barat dengan sistem kapitalisme liberal yang menerima pilihan hukum ini, juga negara-negara sosialis.

Harmonisasi dalam bidang hukum termasuk hukum kontrak merupakan salah satu tujuan penting dalam menyelenggarakan hubungan-hubungan hukum. Tujuan utama harmonisasi hukum berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada (yang akan diharmonisasikan). Mencari titik temu bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab setiap negara memiliki perbedaan yang mendasar dilihat dari segi latar belakangnya baik sejarah, hukum, maupun budayanya. Pluralisme sistem hukum negara-negara merupakan salah satu kendala dasar. Akibatnya upaya-upaya untuk mencapai harmonisasi hukum itu memang tidak mudah.

Untuk menciptakan hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh suatu negara akan sejalan dengan penerapannya dengan ketentuan yang berlaku di negara lain, maka dapat dilakukan dengan pilihan hukum (*choice of law*). Adanya kebebasan menentukan hukum melalui *choice of law* sesuai dengan prinsip *freedom of contract* yang secara universal dikenal oleh

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 215

sistem hukum negara manapun, sehingga akan mampu menjamin keleluasaan dan ketinggian intensitas kegiatan bisnis. Kebebasan berkontrak ini berintikan keleluasaan dalam menentukan bentuk, jenis, dan isi perjanjian.⁵⁶

Lebih lanjut diuraikan bahwa, prinsip kebebasan berkontrak yang menjadi salah satu tiang penyangga Hukum Perjanjian, merupakan landas pacu yang sangat kondusif untuk memfasilitasi laju kegiatan bisnis. Ketika telah terjadi kata sepakat untuk melakukan pilihan hukum dan menandatangani kontrak maka berlaku asas *pacta sunt servanda*. Kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan para pihak terikat untuk mentaati kontrak tersebut. Kekuatan mengikat kontrak tersebut sebagaimana mengikatnya undang-undang. Kebebasan berkontrak ini bukannya tanpa batas, rambunya adalah asal kontrak yang dibuat tidak bertentangan dengan ketertiban umum, perundang-undangan, dan kepatutan.

Demikian halnya dalam *choice of law*, ketertiban umum dan kepatutan berfungsi membatasi kebebasan para pihak untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum.⁵⁷ Ketertiban umum diimplementasikan dengan memperhatikan model law perdagangan seperti ketentuan tentang HAKI, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perbankan, PP tentang Waralaba, sedangkan kepatutan diimplementasikan bahwa kedua

⁵⁶ Mochammad Isnaeni, **Perkembangan Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia**, Disampaikan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tanggal 16 September 2000, hlm. 7.

⁵⁷ Penyelundupan hukum adalah pergeseran titik-titik pertalian objektif yang menentukan titik pertalian sekunder. Penyelundupan hukum dapat dilakukan melalui perubahan titik taut yang menentukan dalam proses yang dipakai sebagai dasar dalam suatu penyelesaian suatu peristiwa hukum.

belah pihak harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Selain itu, *choice of law* dapat dikesampingkan apabila melanggar kebijakan fundamental dari negara lain yang lebih besar kepentingannya terhadap keputusan pokok. Terhadap ketentuan pembatasan tersebut, *choice of law* dapat dikesampingkan apabila hukum yang dipilih tidak mempunyai hubungan yang substantif dengan transaksi dan tidak memiliki alasan yang cukup bagi pilihan hukum para pihak, maka hakim akan menentukan hukum manakah yang berlaku.⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pilihan hukum (*choice of law*) menggunakan prinsip-prinsip hukum kontrak nasional yang juga merupakan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional secara intergratif dan seimbang, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikatnya perjanjian sebagai pilar utama penyangga bangunan Hukum Perjanjian.

Dalam kasus ini, karena adanya kesepakatan lisan di luar kontrak kerja antara PT. Internusa Perkasa Teknik dan PT. NDT *Middle East FZE* yang menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi nya maka hukum yang akan mengatur sengketa tersebut Hukum di Indonesia.⁵⁹

⁵⁸ Sudargo Gautama, **Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia**, Bandung: Penerbit Binacipta, cet. Ke-5, 1987, hlm. 204

⁵⁹ Iswan Rasjudi, Wawancara Pribadi, Kepala Biro Hukum PT. Internusa Perkasa Teknik. 20 Juli 2018

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan penulis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi kontraktor terhadap wanprestasi pihak subkontraktor dalam keterlambatan proyek konstruksi apabila dikaitkan dengan Pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa penyedia Jasa dan/atau sub penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu apabila tidak dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Maka dari itu, penelitian ini mengungkapkan bagaimana perlindungan hukum yang terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian melakukan wanprestasi yang mana menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Perlindungan Preventif dalam kasus ini yaitu pihak kontraktor mestinya mengantisipasi kejadian wanprestasi yang dituangkan dalam perjanjian. Sedangkan Perlindungan Represif dalam kasus ini menggunakan jalur non-litigasi dengan cara negosiasi antara PT. NDT *Middle East* FZE dan PT. Internusa Perkasa Teknik dan dalam hal ini telah terjadi kesepakatan bahwa

PT. NDT *Middle East* FZE sepakat untuk membayar selisih kerugian yang telah ditetapkan oleh PT. Internusa Perkasa Teknik.

Saran

Terhadap permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi yang dapat berimplikasi dalam bidang hukum administrasi, perdata maupun pidana, maka perlu penulis kemukakan saran sebagai berikut :

1. PT. Internusa Perkasa Teknik sebaiknya mengecek secara detail terkait laporan yang dikerjakan oleh pihak subkontraktor sehingga kedepannya tidak terjadi lagi permasalahan seperti diatas.
2. PT. NDT *Middle East* FZE pun harus melengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan kondisi di lapangan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan mutu dan waktu yang telah di jelaskan di dalam kontrak kerja agar tidak menimbulkan keraguan dari salah satupihak.
3. Setiap kontrak kerja yang dibuat oleh kedua belah pihak seharusnya mengacu pada klausula perjanjian yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

- Agus Yudha Hermeko, **Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial**, Jakarta, Kencana, 2011
- Amari, Mohammad dan Asep N. Mulyana, **Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi**, Aneka Ilmu, Semarang, 2010
- Amiruddin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Rajagrafindo, Persada, Jakarta, 2004
- Bachsan Mustafa, **Sistem Hukum Indonesia Terpadu**, Citra Aditya Bakti Bandung, 2003
- Dipohusodo, Istimawan. **Manajemen Proyek Konstruksi Jilid 2**. Kanisius: Yogyakarta, 1996
- Ervianto, Wulfram I. **Manajemen Proyek Konstruksi**, Edisi Pertama, Salemba Empat, Yogyakarta, 2002
- F.X. Djumialdji, **Perjanjian Pemborongan**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Hans Kelsen, **Teori Hukum tentang Hukum dan Negara**, terjemahan RaisulMuttaqin, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006
- H. S. Salim, **Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak**, Cet. II. Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- H. Shahab, **Menyingkap dan Meneropong Undang-undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 dan Penyelesaian Alternatif serta kaitannya dengan UU Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 dan FIDIC** Yogyakarta, 2002
- J.H. *Nieuwieenhuis*, *Drie Beginselen van Contractenrecht*, diss, RUL, 1979, Deventer, 1979
- Jhonny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media Publishing, Malang, 2007
- Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang **Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa**

- Mariam Darus Badruzaman, **Aneka Hukum Bisnis**, Bandung, 1994
- Munir Fuady, **Hukum Kontrak**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Ridwan Khairandy, **Hukum Kontrak Indonesia: Dalam perspektif Perbandingan** (Bagian Pertama), Yogyakarta, FH. UII Press, 2014
- Ridwan Syahrani, **Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata** (Bandung: Alumni, 2013)
- Samsul Ramli, **Pedoman Pengadaan Barang/Jasa**, Cet. 1. Jakarta; Visimedia
- Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Subekti, **Aneka Perjanjian**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Subekti, **Hukum Acara Perdata**, Bina Cipta, Bandung, 1989
- Subekti (1), **Kamus Hukum**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Simamora, Y. Sogar, **Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)**, Kantor Hukum “Wins & Partners”, Cetakan kedua, Surabaya, 2013
- Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Jakarta, C.V Rajawali, 1990
- Sri Mamudji, *et al.* **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Titik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional** Jakarta, 2011
- The Liang Gie, **Teori-teori Keadilan**, Super, Jakarta, 1977, 2006
- WirjonoProdjodikoro, **Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu**, Sumur, Bandung, 1991

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ke III tentang perikatan

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Masyarakat Jasa Konstruksi (LNRI TAHUN 2000 NOMOR 63, TLNRI NOMOR 3955).

Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Konstruksi (LNRI TAHUN 2000 NOMOR 64, TLNRI NOMOR 3956).

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi Konstruksi (LNRI TAHUN 2000 NOMOR 65, TLNRI NOMOR 3957).

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (LNRI TAHUN 2017 NOMOR 11, TLNRI NOMOR 6018).

WEBSITE

Law Teacher, Intention To Create Legal Relations,
<https://www.lawteacher.net/free-law-essays/contract-law/intention-to-create-legal-relations.php?cref=1>, November 2013, dikunjungi pada tanggal 5 Mei 2018.

<http://www.constructionlawmadeeasy.com/>, dikunjungi pada tanggal 26 Juli 2018

<http://AHmv.negarahukum.com/hukum/ihBies-ermessen.html>, dikunjungi pada tanggal 5 agustus 2018